

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Probolinggo

Berdasarkan studi dokumentasi pada Profil Kota Probolinggo dalam angka tahun 2013, di zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku Negara-kertagama yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Prapanca.

Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan di zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan-perubahan / perkembangan seirama dengan perkembangan zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi

(Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”.

Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono di pengaruhi, diadu untuk menangkap / membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang/melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhan tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara/lelono.

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro,

Bupati Surabaya ke 10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean “Sentono”, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat.

Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan Masjid Jami’ ($\pm$ tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo” (Probo : sinar, linggo : tugu, badan, tanda peringatan, tongkat). Probolinggo : sinar yang berbentuk tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah meteor/bintang jatuh). Setelah wafat Kanjeng Djimat dimakamkan di pasarean belakang Masjid Jami’.

2. Geografi dan Kondisi Alam Kota Probolinggo

Berdasarkan studi dokumentasi pada Profil Kota Probolinggo dalam angka tahun 2013, letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ}43'41''$ sampai dengan $7^{\circ}49'04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}10'$ sampai dengan $113^{\circ}15'$ Bujur Timur dengan ketinggian daerah ± 4 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat $56,667 \text{ km}^2$. Kota Probolinggo

merupakan salah satu kota di wilayah bagian utara Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan.

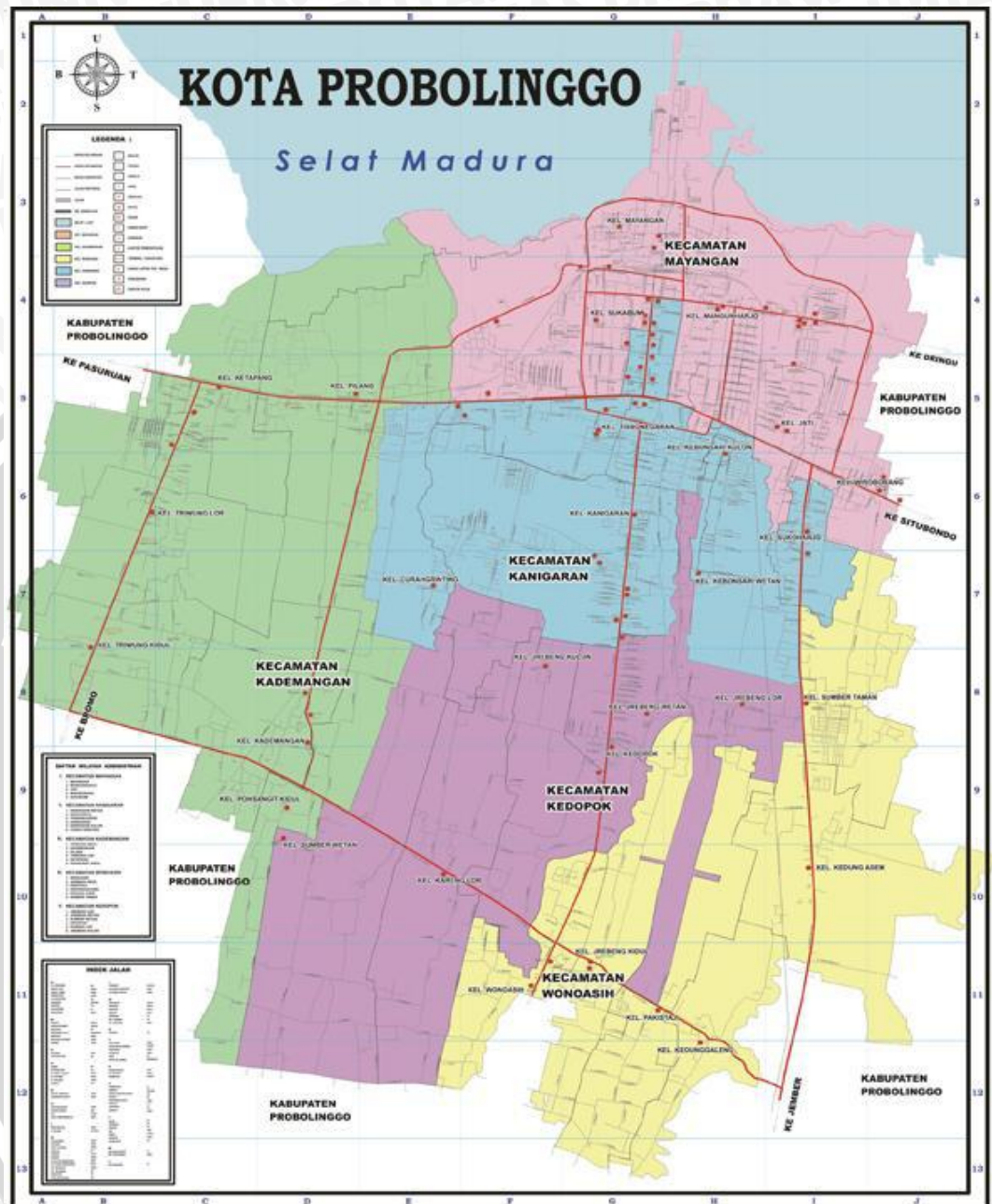
Di samping itu, Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan sebelah timur Kota Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota di sebelah barat yakni: Pasuruan, Malang dan Surabaya. Adapun batas wilayah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : dibatasi oleh Selat Madura

Sebelah Timur : dibatasi oleh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : dibatasi oleh Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Sebelah Barat : dibatasi oleh Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo



Gambar 3. Peta Kota Probolinggo

Sumber: Probolinggo dalam angka tahun 2013-BPS Kota Probolinggo

Kota Probolinggo memiliki letak yang sangat strategis karena merupakan titik persimpangan jalan yang menuju Kota Surabaya, Jember dan Banyuwangi. Di samping itu, Kota Probolinggo dilalui oleh jalan negara yang menghubungkan pulau Jawa dan pulau Bali. Dalam hal luas wilayah, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,70 Ha, terdiri dari lahan sawah 1.967,70 Ha (34,72%) dan lahan bukan sawah terbagi atas lahan kering 3.595 Ha (97,19%) dan lahan lainnya (tambak) 104 Ha (2,81%). Kemudian, lahan kering terdiri dari pekarangan 2.1778,65 Ha (60,60%), tegal/kebun 761,37 Ha (21,18%) dan lain-lain lahan kering 654,98 Ha (18,22%).

Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, antara lain Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran sungai mencapai 3,80 Km, yang terpanjang alirannya adalah Sungai Legundi dengan panjang aliran mencapai 5,439 Km dan yang terpendek adalah Sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 Km.

Keadaan iklim di Kota Probolinggo merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan terjadi pada November sampai dengan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan-bulan lain curah hujan relatif rendah. Suhu udara tertinggi 32°C dan terendah 26°C dengan

kelembapan udara berkisar 85%. Selain itu, pada bulan Juli sampai dengan September di Kota Probolinggo terdapat angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah tenggara ke barat laut, angin ini populer dengan sebutan/nama 'Angin Gending'.

3. Demografi dan Sosial Budaya Kota Probolinggo

Sumber data kependudukan dapat diperoleh melalui sensus penduduk dan registrasi penduduk. Sensus penduduk adalah suatu kegiatan pengumpulan data kependudukan terhadap seluruh penduduk di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, pada tahun yang berakhir angka 0. Registrasi penduduk adalah suatu kegiatan pencatatan rutin setiap kejadian yang terjadi pada seluruh penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Perbedaan mendasar antara data kependudukan hasil sensus penduduk dengan hasil registrasi adalah bahwa sensus penduduk bersifat *de facto* sedangkan hasil registrasi penduduk bersifat *de jure*.

Jumlah penduduk Kota Probolinggo akhir tahun 2012 hasil registrasi penduduk, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebesar 219.139 jiwa. Persentase terbesar di Kecamatan Mayangan sebesar 27,6 % disusul Kanigaran 25,5 %, Kademangan sebesar 17,8%, Wonoasih sebesar 14,8% dan Kedopak sebesar 14,3%. Bila dilihat dari status kewarganegaraan, hanya 0,017 persen atau sebesar 38 jiwa yang berkewarganegaraan asing (WNA) dari total penduduk Kota Probolinggo.

Sex ratio pada akhir tahun 2012 sebesar 98,62, angka ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Apabila ditinjau per kecamatan maka *sex ratio* Kecamatan Kademangan sebesar 98,4, Kedopak sebesar 99,5, Wonoasih sebesar 99,4, Mayangan sebesar 97,8, dan Kanigaran sebesar 98,7. Jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 2012 sebesar 2.756 jiwa, jumlah kematian sebesar 1.752 jiwa dan penduduk migrasi yang masuk 5.619 orang, sedangkan yang keluar 5.545 orang.

Karakteristik sosial penduduk Kota Probolinggo dapat dilihat dari segi etnik dan budaya masyarakatnya. Masyarakat Probolinggo dilihat dari sosial budaya sebagian berasal dari budaya agraris (petani dan nelayan) dan berkembang menjadi masyarakat urbanis. Sedangkan dari spektrum kesukuan, komposisi sosial masyarakat Kota Probolinggo secara keseluruhan didominasi oleh suku Jawa dan Madura yang memiliki karakteristik ulet, lugas, terbuka dan lugas dalam mengekspresikan pikiran dan keinginan mereka. Corak adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Kota Probolinggo merupakan perpaduan diantara kedua budaya tersebut, yang disebut *pendhalungan*. Perpaduan masyarakat dan budaya asli dapat dicerminkan melalui kegiatan gotong royong. Secara geo-politik, Kota Probolinggo termasuk dalam kawasan yang dikenal dengan sebagai kawasan “Tapal Kuda”. Mayoritas penduduk Kota Probolinggo menganut agama Islam.

Salah satu wujud kekhasan budaya masyarakat ialah lahirnya seni budaya khas daerah seperti seni tari, seni suara, seni musik dan seni rupa. Contoh tariannya adalah tari "Jaran Bodag" yang merupakan tarian khas Kota Probolinggo. Hal ini selain memperkuat budaya masyarakat juga menjadi aset yang bisa dikembangkan untuk wisata maupun industri.

4. Situasi Politik dan Pemerintahan Kota Probolinggo

Seorang Walikota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pemerintahan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang diaplikasikan dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Dinas/Badan/Kantor yang dibentuknya, dalam lingkup wilayah administrasi terkecil dibantu oleh 5 Camat dan 29 Lurah.

Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Pada pilwali 2008 Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan, berdasarkan Probolinggo dalam angka 2010 dengan penduduk sebesar 217.618 jiwa memiliki jumlah pemilih sebesar 156.366 pemilih, terdiri dari 80.339 perempuan dan 76.027 laki-laki. Jumlah pemilih terpadat terdapat pada Kecamatan Mayangan yaitu sebesar 46.149 pemilih.

Partai politik yang terdaftar di Kota Probolinggo saat itu sebanyak 24 parpol yang tercatat sebagai parpol peserta pemilu 2004. Dari jumlah tersebut 7 parpol diantaranya memiliki kursi di DPRD setempat,

sedangkan sisanya, 17 parpol tidak memiliki kursi. Ketujuh parpol yang memiliki wakil di DPRD setempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memiliki 9 kursi (30%) dengan perolehan suara 30.367 suara (26,04%), PDIP dengan pemilikan 7 kursi (23,33%) dan 26.601 suara (22,81%), kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 4 kursi (13,33%) dengan 14.759 suara (12,66%), Partai Demokrat yang memiliki 4 kursi (13,33%) dengan 10.456 suara (8,97%), Partai Golkar dengan 3 kursi (10%) dan 11.282 suara (9,67%), Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 2 kursi (6,67%) dan 3.896 suara (3,34%) dan terakhir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 1 kursi (3,33%) dan 2.622 suara (2,25%).

5. Visi dan Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2010-2014

a. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam pengertian yang dimaksud serta dengan berlandaskan kepada dasar filosofis yang dianut oleh masyarakat Kota Probolinggo, maka visi pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 adalah:

*“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Probolinggo
melalui Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Berbasis Investasi Produktif dan Berkesinambungan”*

Visi ini memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan masyarakat, adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin akan menjadi modal utama untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni masyarakat sipil yang berdaya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya sehingga senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembangunan.
- 2) Kemiskinan, merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

- 3) Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja kurang dari 2 (dua) hari dalam satu minggu dan yang bersangkutan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan bagian dari mata rantai kemiskinan dimana orang yang menganggur tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan sehingga akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 4) Investasi merupakan upaya untuk menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi tapi

juga dari aspek manusia sebagai sumber daya insani dan sumber daya sosial. Dalam aspek ekonomi, investasi dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak langsung terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan bermuara terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Dalam aspek manusia sebagai sumber daya insani, investasi merupakan manifestasi dari upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun mental-spiritual. Dalam aspek manusia sebagai makhluk sosial, investasi merupakan wujud dari upaya-upaya membentuk modal sosial-kolektif yang harmonis dan sinergis antar elemen masyarakat sehingga dapat memberikan daya dukung yang optimal terhadap terwujudnya tujuan bersama dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

- 5) Produktif dan berkesinambungan merupakan komitmen pemerintah Kota Probolinggo untuk menjadikan investasi lebih memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan rakyat serta berkesinambungan dalam jangka panjang serta berwawasan lingkungan.

b. Misi Pembangunan Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kota Probolinggo, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kota Probolinggo 2010-2014, yakni:

- 1) Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
- 3) Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima.
- 4) Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

c. Motto dan Prinsip Pembangunan Daerah

Motto dan prinsip merupakan *energizing* bagi seluruh sumber daya penggerak pembangunan di Kota Probolinggo yang bermanfaat

sebagai penyelaras semua aktifitas pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Melalui manifestasi motto dan prinsip, ikatan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo akan semakin kokoh.

Motto yang menjadi kehendak dan tekad masyarakat Kota Probolinggo dalam pembangunan daerah adalah:

- 1) *Trikarsa Bina Praja*, yaitu tiga kehendak masyarakat Kota Probolinggo untuk melestarikan serta menumbuhkembangkan ciri khas Kota Probolinggo sebagai Kota Bayuangga (Angin, Anggur, dan Mangga)
- 2) *Bestari*, yaitu tekad bersama masyarakat Kota Probolinggo untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan motto Kota Probolinggo sebagai Kota Bestari (Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah)

6. Makna Lambang Kota Probolinggo



Gambar 4. Lambang Kota Probolinggo

LAMBANG KOTA PROBOLINGGO

Ditetapkan dengan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 203 Tahun 1956

Penjelasan :

1. Ukuran Lambang : 28 x 36 cm
2. Bentuk Lambang : Perisai; dimaksudkan sebagai tanda pengenalan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan negara dan daerahnya yang telah tercapai.

3. Dasar Biru Muda : melambangkan Kota Probolinggo sebagai daerah pantai
4. Isi : a) Bintang bercahaya dengan sinar keemasan
b) Daun Anggur dan Daun Mangga sebagai hiasan, tidak berwarna
5. Arti Bintang : “Probolinggo” yang ada hubungannya dengan cerita kuno, yaitu jatuhnya sebuah benda bercahaya (meteor) dalam lambang dilukiskan sebagai bintang dan tempat jatuhnya benda tersebut oleh raja-raja dahulu dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan perdamaian dan mengakhiri perselisihan. *Probo* dalam bahasa Sansekerta berarti sinar, sedang *Lingga* berarti tanda, dalam hal ini tanda perdamaian. Dapat juga diartikan : asli atau sederhana (seperti perwujudan seluruh lambang yang sederhana).
Dengan lambang ini diharapkan jiwa nurani segenap penduduk Kota Probolinggo selalu mendapat tuntutan cahaya terang sehingga alam pikiran dan perbuatannya selalu ditujukan pada usaha tercapainya masyarakat adil makmur, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

6. Daun Anggur dan Mangga : Mengingat Kota Probolinggo sebagai penghasil buah-buahan Anggur dan Mangga yang terkenal seluruh Indonesia.

(Sumber: BPS-Kota Probolinggo dalam Angka Tahun 2013).

B. Profil Program Morning On Panglima Sudirman Street (MPS2)

1. Latar belakang

Berdasarkan hasil wawancara, MPS2 mulai dijalankan pada tanggal 24 Mei 2009 dilaksanakan bertepatan dengan hari besar pada bulan Mei yaitu Hari Pendidikan Nasional. Bappeda selaku instansi yang mencanangkan program MPS2 menunjuk Dinas Pendidikan sebagai koordinator kegiatan karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Program ini dijalankan berdasarkan visi Pemerintah Kota Probolinggo 2006-2009 yaitu “Terwujudnya Kota Probolinggo sebagai tujuan investasi yang prospektif, kondusif dan partisipatif”. Selanjutnya dikembangkan sesuai rancangan visi Pemerintah Kota Probolinggo 2010-2014 yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo melalui percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis investasi produktif dan berkesinambungan.

Dengan demikian, Bappeda bersama Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan perekonomian daerah di Kota Probolinggo diperlukan adanya suatu upaya untuk menggerakkan sektor riil yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi di daerah, baik itu pengusaha besar, UMKM dan

seluruh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo perlu untuk melakukan langkah kongkrit yang dikemas dalam suatu kegiatan dengan melibatkan seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu Bappeda mengusulkan untuk menggagas suatu event/kegiatan yang bertajuk “*Morning on Panglima Sudirman Street*” yang lebih dikenal dengan sebutan MPS2. Selain itu, MPS2 juga dijadikan sebagai wadah untuk menciptakan Kota Probolinggo menjadi lebih berkembang. Program MPS2 dicanangkan atas dasar permasalahan UMKM yang selama ini mengalami kesulitan dalam hal memasarkan produksinya. UMKM yang ada di Kota Probolinggo kurang produktif karena pemasarannya hanya dijual di kawasan lokal saja, masih kurang untuk mendapatkan konsumen di luar daerah, maka Bappeda dan Pemerintah Kota Probolinggo membuat sebuah sentra produksi yang diwujudkan melalui MPS2. Untuk memeriahkan kegiatan ini maka digelar pertunjukkan kreatifitas dan inovasi masyarakat yang dilakukan oleh SKPD Pemerintah Kota Probolinggo pada saat *ceremonial*.

Pada pelaksanaan kebijakan melalui program MPS2 secara teknis dilakukan dengan metode pengkavlingan sepanjang Jalan Panglima Sudirman mulai Rumah Dinas Walikota Probolinggo sampai dengan pertigaan Jalan Gatot Subroto. Selama kegiatan berlangsung tidak diperkenankan kendaraan bermotor melewati jalan yang digunakan untuk acara MPS2. Pengunjung dapat menikmati acara ini melalui jalan kaki

dengan suguhan seni khas Kota Probolinggo yang ditampilkan oleh semua SKPD Kota Probolinggo dan bermacam-macam produk UMKM dari Kota Probolinggo.

2. Maksud dan Tujuan MPS2

Menurut Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2009 Tantang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman “*Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2)” maksud diselenggarakannya “*Morning on Panglima Sudirman Street*” (Pagi di Jalan Panglima Sudirman) untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Probolinggo. Sedangkan tujuan “*Morning on Panglima Sudirman Street*” (Pagi di Jalan Panglima Sudirman) antara lain adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha (UMKM-PKL) untuk mengembangkan pemasaran produknya;
- b. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat Kota Probolinggo.

Berdasarkan tujuan tersebut MPS2 dapat dijadikan sebagai sarana bagi pelaku ekonomi utamanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena permasalahan UMKM yang muncul di Kota Probolinggo yaitu kurangnya sarana pemasaran, pemasaran produk UMKM di Kota Probolinggo yang kurang berkembang dapat dipasarkan di MPS2 karena pada saat pelaksanaan MPS2 pengunjung yang datang bukan hanya masyarakat lokal saja, pengunjung juga berasal dari luar kota bahkan luar

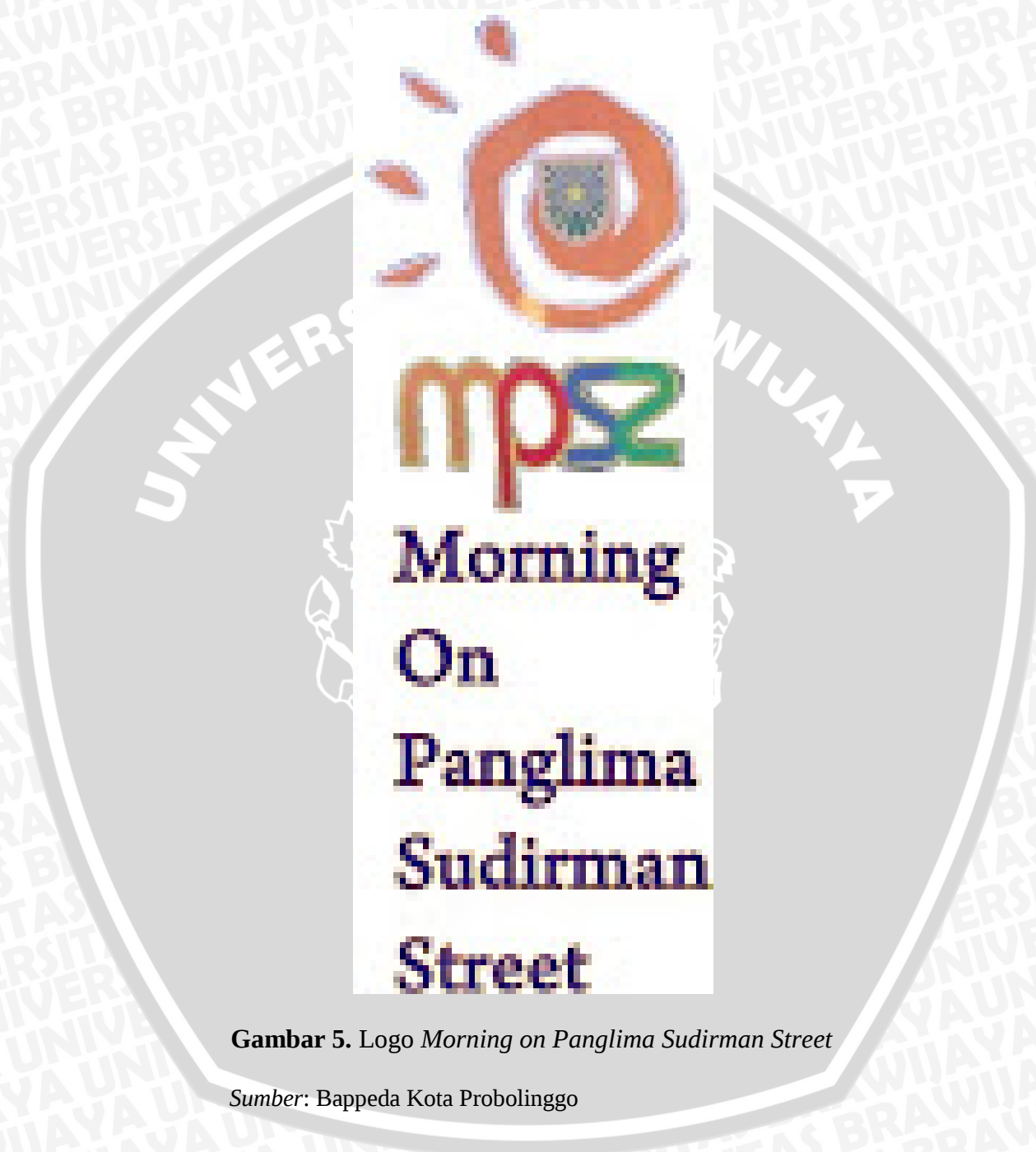
negeri yang kebetulan pada saat itu sedang berkunjung di Kota Probolinggo. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan ide-ide kreatifnya dan inovatifnya yang dituangkan melalui produksinya.

3. Manfaat MPS2

Menurut Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman “*Morning On Panglima Sudirman Street* (MPS2)” manfaat yang dapat diambil dari penyelenggaraan “*Morning on Panglima Sudirman Street*” (Pagi di Jalan Panglima Sudirman) antara lain:

- a. Meningkatnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya UMKM-PKL;
- c. Memacu masyarakat Kota Probolinggo untuk berpikir kreatif dan inovatif;
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Probolinggo.

4. Makna Logo MPS2



Gambar 5. Logo Morning on Panglima Sudirman Street

Sumber: Bappeda Kota Probolinggo

LOGO MORNING ON PANGLIMA SUDIRMAN STREET

Ditetapkan dengan

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

Nomor 17 Tahun 2009

Penjelasan:

1. Logo Pemerintah Kota Probolinggo:

Kegiatan pagi di Jalan Panglima Sudirman-“*Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2) difasilitasi oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat.

2. Matahari berwarna orange:

Kegiatan *Morning on Panglima Sudirman Street* dilaksanakan pada pagi hari saat matahari terbit.

3. Warna orange, merah, biru dan hijau pada tulisan MPS2:

Kegiatan *Morning on Panglima Sudirman Street* dilaksanakan dengan penuh warna-warni keceriaan di pagi hari.

4. Warna merah pada tulisan Morning On Panglima Sudirman Street:

Berani dalam menciptakan kreasi dan inovasi.

C. Penyajian Data

1. Implementasi *Morning on Panglima Sudirman Street* dalam mengembangkan UMKM

Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Morning on Panglima Sudirman Street* dalam mengembangkan UMKM, terlebih

dulu dianalisa mengenai para pelaku dan pembuat kebijakan. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui siapakah *leading sector* kebijakan ini dan tujuan serta manfaat yang diperoleh bagi masyarakat maupun pengusaha UMKM. Implementasi kebijakan dapat dilihat dari perspektif sumber dan tujuan kebijakan, aktor atau pelaku kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait dan bentuk dukungan dari publik. Setelah diketahui bagaimana implementasi *Morning on Panglima Sudirman Street* yang terbentuk, akan mudah untuk menganalisa mengenai dampaknya terhadap UMKM dalam hal meningkatkan produksi melalui sektor pemasaran. Sebelum menganalisa implementasi *Morning on Panglima Sudirman Street*, terlebih dahulu disajikan data hasil penelitian.

a. Sumber dan tujuan kebijakan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengetahui bagaimana implementasi *Morning on Panglima Sudirman Street* berjalan, terlebih dahulu harus diketahui sumber dan tujuan kebijakan. Sumber kebijakan merupakan awal mula kebijakan itu berasal. Dalam hal ini sumber kebijakan bisa dilakukan oleh pemerintah juga bisa berasal dari tuntutan masyarakat. Implementasi kebijakan *Morning on Panglima Sudirman Street* bersumber dari Walikota Probolinggo H.M. Buchori bersama Kepala BAPPEDA Ir. Budi Krisyanto, Msi yang pada saat itu membuat konsep ataupun ide untuk meningkatkan perekonomian dan membantu pengusaha UMKM

dalam mengembangkan pemasarannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“Sumber kebijakan dalam program *Morning on Panglima Sudirman Street* berasal dari Pemerintah Kota karena di Kota Probolinggo sarana untuk promosi dagang masih kurang, misalnya produk UMKM, mau dipromosikan kemana ini kan masih belum tau dan dibutuhkan sentra produksi untuk menjual produknya sehingga dengan kebijakan Pemerintah Kota melalui program *Morning on Panglima Sudirman Street* pengusaha UMKM dapat memasarkan produknya disini. Di BAPPEDA ide tersebut dicanangkan di Bidang Sosbud jadi inisiatif memang dari pemerintah.” (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Ide tersebut muncul berawal dari permasalahan UMKM yang ada di Kota Probolinggo yaitu sulitnya memasarkan barang produksi sehingga dibentuklah *Morning on Panglima Sudirman Street* sebagai sentra produksi. Implementasi *Morning on Panglima Sudirman Street* juga dilatarbelakangi oleh visi Pemerintah Kota Probolinggo 2006-2009 “Terwujudnya Kota Probolinggo sebagai tujuan investasi yang prospektif, kondusif dan partisipatif” dan rancangan visi Pemerintah Kota Probolinggo 2010-2014 “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo melalui percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis investasi produktif dan berkesinambungan”. Bappeda bersama Pemkot kemudian mengikutsertakan semua SKPD, organisasi, perwakilan masyarakat, dan perusahaan untuk menjalankan program *Morning on Panglima Sudirman Street*.

Aktor yang terlibat cukup banyak karena menyangkut perkembangan UMKM sehingga paguyuban UMKM juga dilibatkan

dan dinas yang menangani perdagangan produksi UMKM adalah Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan. Diskoperindag Kota Probolinggo melalui perwakilan paguyuban UMKM saling bekerja sama untuk memanfaatkan *event* ini sebagai ajang promosi dagang karena pengunjung yang datang berasal dari berbagai daerah otomatis keuntungan yang didapat oleh pengusaha UMKM bisa berlipat.

Secara geografis letak Kantor BAPPEDA berada pada sebelah barat jantung Kota Probolinggo, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Nomor 52 Kota Probolinggo dengan nomor pesawat telepon/fax (0335) 427232 dengan alamat *website*:<http://www.probolinggo.go.id>. Kantor BAPPEDA terbentuk berdasarkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur pada tahun 1978 agar membentuk organisasi baru yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah Kota Probolinggo membentuk Badan Perencanaan Pembangunan yang pertama. Untuk membentuk Kantor BAPPEDA seluruh Daerah Tingkat II se Jawa Timur telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor BPPD.053/388/1980 tanggal 23 Mei 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Tingkat II. Surat keputusan ini dibuat dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dalam kapasitas sebagai *entry point* pembangunan daerah itulah keberadaan BAPPEDA Kota Probolinggo dibentuk untuk menjalankan tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Jumlah karyawan/pegawai BAPPEDA Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2013 mencapai 80 orang atau bertambah 6 orang dari tahun 2012 yang berjumlah 74 orang.

Sebagai SKPD penggagas program MPS2, BAPPEDA memiliki beberapa sarana dan prasarana penunjang, seperti ruang kerja, ruang komputer untuk mengolah data dan ruang pertemuan. Ide atau gagasan MPS2 agar tidak sebagai wacana saja, maka muncul kebijakan implementasi *Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2) yang diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2009 dengan pertimbangan untuk meningkatkan perekonomian daerah Kota Probolinggo, diperlukan upaya untuk menggerakkan sektor riil yang didukung dengan peningkatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam suatu kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“BAPPEDA yang dikepalai Ir. Budi Krisyanto, membuat gagasan yang berawal dari Visi Pemerintah Kota Probolinggo bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibutuhkan suatu kegiatan atau program bernama MPS2 dengan tujuan agar pelaku UMKM mendapatkan penghasilan tambahan.” (Hasil wawancara tanggal 20 Januari 2014, pukul 09.00 WIB di Kantor Bappeda).

Morning on Panglima Sudirman Street diprogramkan untuk meningkatkan perekonomian UMKM, maka dari itu BAPPEDA dan Walikota mengikutsertakan semua SKPD di Kota Probolinggo untuk berpartisipasi dalam program ini agar lebih meramaikan kegiatan. Selanjutnya juga diikutsertakan swasta dan masyarakat melalui paguyuban-paguyuban, karena program ini dikatakan sebagai sentra produksi maka UMKM dapat memasarkan produknya dan sebagai inovasi produk apabila terdapat produk baru yang perlu dikembangkan. Untuk mengkoordinir UMKM maka Diskoperindag dan paguyuban UMKM Kota Probolinggo perlu saling bekerja sama dan dibutuhkan koordinasi. Diskoperindag juga sebagai penggerak dan motivator UMKM karena untuk membantu UMKM Diskoperindag memberikan sarana dan prasarana seperti gerobak yang akan digunakan untuk berjualan serta menunjang keberhasilan program.

Kantor Diskoperindag beralamat di Jalan. Mastrip No. 155 Kota Probolinggo, dengan nomor pesawat telepon (0335) 423053. Sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang juga sebagai pendukung sumber kebijakan, Diskoperindag juga melakukan pembinaan kelembagaan usaha untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah,

formal dibidang koperasi, energi mineral, industri, dan perdagangan.

Hal senada juga diutarakan oleh bapak Budhie Nuryoko, selaku

Kepala Bidang Koperasi dan UKM, mengatakan bahwa :

“Diskoperindag mempunyai kewajiban untuk mendukung visi organisasi ini, jadi dalam rangka menumbuh kembangkan pelaku UMKM dilakukan diklat bagi pelaku UMKM yang melakukan bidang industri setahun bisa lima sampai enam kali tergantung manajemennya, terus masalah peningkatan produk-produknya dan legalitas”. (Hasil wawancara tanggal 11 Februari 2014, pukul 10.00 WIB di Kantor Diskoperindag).

Selanjutnya dalam pelaksanaan program, Pemerintah Kota Probolinggo termasuk Walikota beserta para SKPD berperan sebagai fasilitator kegiatan. Fasilitator memegang peranan penting dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan, karena mereka berperan sebagai ujung tombak sosialisasi, implementasi, *monitoring* dan evaluasi kegiatan. MPSS merupakan program yang bersifat rutin dan harus dijalankan mengingat bahwa melalui MPS2 dapat membentuk masyarakat yang kreatif dan inovatif.

Sumber kebijakan yang berasal dari Walikota Probolinggo pada saat itu dalam pimpinan Walikota H.M. Buchori, membuat program MPS2 agar nantinya para pelaku UMKM bisa terlibat langsung untuk memasarkan hasil produknya. Pelaksanaan MPS2 diagendakan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan tema pada setiap bulannya disesuaikan dengan peringatan hari nasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak H.M. Buchori, selaku Walikota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“Ini memang ide saya untuk mewujudkan kota dengan tujuan investasi dan pariwisata bagi masyarakat. Serta rencana visi pemerintah yang terbebas dari kemiskinan dan pengangguran melalui investasi yang produktif dan berkesinambungan”. (Sumber: Harian Bangsa, Jum’at 8 Mei 2009).

MPS2 merupakan sebuah program yang dijalankan setiap 3 bulan sekali dengan maksud agar pada saat *event* berikutnya menampilkan sesuatu yang berbeda dan terus membuat pengunjung penasaran dengan aksi-aksi hiburan dan kreativitas produk pelaku UMKM maupun masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H.M. Buchori, selaku Walikota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dalam rangka mengajak warga Kota Probolinggo untuk berinovasi dengan melibatkan budaya dari daerah lain”. (Sumber: Harian Tunas Bangsa, Edisi 93 Tahun III/29 November 2009)

Tujuan dari kebijakan melalui program MPS2 telah diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman “*Morning on Panglima Sudirman Street*” pada Bab I Pasal I, yaitu tujuan diselenggarakannya kegiatan pagi di Jalan Panglima Sudirman “*Morning on Panglima Sudirman Street*” adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Probolinggo dengan menyediakan sarana bagi pelaku ekonomi utamanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pemasaran hasil produksinya serta menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan ide-ide kreatif dan inovatifnya.

Melalui program MPS2 pelaku UMKM dapat memaksimalkan produksinya karena di *event* ini meskipun acaranya dimulai pukul 05.00-09.00 WIB pengunjungnya sangat antusias sekali dan memadati area Jalan Panglima Sudirman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H.M. Buchori, selaku Walikota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“Penyelenggaraan acara ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesempatan bagi para pengusaha UMKM dan masyarakat dalam mengembangkan pemasaran produknya dan juga sebagai wahana bagi masyarakat untuk menampilkan hasil kreasi dan inovasi yang dilakukan pada berbagai bidang”. (Sumber: Tabloid Suara Kota Edisi 102/ 7 Juni 2009)

Tujuan dan sasaran program MPS2 diarahkan untuk promosi dagang bagi para pengusaha UMKM. Hal ini dilatar belakangi karena permasalahan yang kerap muncul bagi pengusaha UMKM yaitu akses pemasaran dan kurangnya promosi. Tujuan dari program MPS2 juga diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“Tujuan MPS2 adalah untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi khususnya pengusaha UMKM. Selain itu dapat dijabarkan menjadi, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Kedua, meningkatkan partisipasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang ketiga ya keberlangsungan ekonomi tetap terjalin dalam artian keberlangsungan ekonomi terus berjalan. Terus ini meningkatkan pengetahuan masyarakat kan tidak hanya menjual produk UMKM tetapi juga menjual produk ilmu karena masing-masing dari setiap SKPD juga mengeluarkan hasil-hasil karyanya”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Demikian uraian singkat mengenai sumber dan tujuan kebijakan. MPS2 merupakan program yang bersumber langsung dari

kebijakan Bapak Walikota Probolinggo, H.M. Buchori dan dikembangkan bersama Kepala Bappeda, Ir. Budi Krisyanto, M.Si dengan melibatkan seluruh SKPD di Kota Probolinggo termasuk Diskoperindag yang merupakan sebuah instansi yang mengerahkan UMKM dalam hal membantu permasalahan di bidang pemasaran atau perdagangan. Keberadaan program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan pelaku UMKM di Kota Probolinggo dan yang bertujuan sebagai sarana pemasaran atau promosi produk bagi pengusaha UMKM.

b. Aktor atau pelaku kebijakan dan komunikasi antar organisasi

Menurut Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman- *Morning on Panglima Sudirman Street* pelaksana atau aktor dan peserta adalah SKPD Pemerintah Kota Probolinggo, swasta/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau masyarakat. Kegiatan MPS2 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan mengerahkan semua SKPD, swasta ataupun masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana. Aktor-aktor atau pemeran dalam pelaksanaan kebijakan program MPS2 terbagi dari aktor birokrasi dan kelompok kepentingan maupun swasta. Hal ini dilakukan agar tercipta komunikasi yang baik serta saling membantu dalam mensukseskan program MPS2.

MPS2 dikoordinasikan langsung oleh Walikota dengan menunjuk salah satu SKPD untuk menjadi koordinator sesuai dengan tema dan *event* hari besar nasional, hari besar keagamaan dan atau peringatan hari-hari khusus pada bulan yang bersangkutan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“Setiap pelaksanaan MPS2 koordinator acaranya berbeda-beda disesuaikan dengan hari besar nasional pada bulan pelaksanaan dan ditunjuk langsung oleh Bapak Walikota Buchori. Pelaksanaan MPS2 bisa dikoordinatori oleh BAPPEDA, Dinas Kesehatan, BLH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan SKPD lainnya se Kota Probolinggo. Hal itu terus dilakukan bergantian setiap tiga bulan sekali”. (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014, pukul 10.00 WIB di Kantor Bappeda)

Pada awal pelaksanaan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2009 dengan tema “Gelar Kreasi dan Inovasi Pelajar (GKIP). Pada saat itu ditampilkan berbagai bentuk kreasi dan inovasi dari para pelajar tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA berupa seni tari dan seni musik. Selain digelar pertunjukkan hasil kreasi dan inovasi pelajar, juga diramaikan oleh para pengusaha UMKM dan penjual aneka makanan sehingga dapat menyemarakkan suasana dan memberikan kesempatan kepada masyarakat pengunjung untuk menikmati berbagai makanan dan berbelanja sambil menyaksikan pertunjukkan hasil kreasi dan inovasi pelajar. Pada pelaksanaan ini yang ditunjuk sebagai koordinator acara yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena melibatkan sekolah mulai dari TK sampai

SMA/MA/SMK. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“Pada masa awal pelaksanaan dikoordinatori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo atas mandat Bapak Walikota Probolinggo dan dengan melibatkan sekolah maka otomatis wali murid juga akan menyaksikan penampilan putra-putri mereka sehingga acara akan terlihat ramai dan produk-produk UMKM pun juga banyak yang akan dibeli”. (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014, pukul 10.15 WIB di Kantor Bappeda)

Pemerintah kota menunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena pada bulan Mei terdapat Hari Besar Nasional yaitu Hari Pendidikan Nasional. Aktor yang terlibat selain dari birokrasi pemerintah juga dilibatkan kelompok kepentingan seperti paguyuban UMKM karena program ini yang menjadi sasaran yaitu pengusaha UMKM agar produksi mereka berkembang dan terus meningkat. Paguyuban UMKM Kota Probolinggo saat ini diketuai oleh Bapak Alif dengan alamat sekretariat Jalan Brigjend Katamso No. 102 Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Melalui paguyuban UMKM maka pengusaha UMKM dapat diarahkan untuk berdagang di MPS2 dengan produk unggulan mereka dengan harapan produk yang mereka buat mampu meningkatkan taraf kehidupan untuk pelaku UMKM sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Pemerintah dalam membantu pengusaha UMKM sangat kompak dan terus memberi fasilitas yang dibutuhkan oleh UMKM dan melalui MPSS ini orang yang tergolong perekonomiannya rendah atau lemah dapat meraup untung 2 sampai 3 kali lipat pada saat acara

MPS2”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Dalam pelaksanaan MPS2 juga melibatkan unsur swasta seperti perbankan, swalayan, agen travel dan sebagainya. Meskipun melibatkan tiga sektor namun peran dan panitia inti berasal dari birokrasi yang ditujukan kepada semua SKPD seperti yang telah diatur oleh Perwali. Pemerintah sebagai aktor utama selama pelaksanaan selalu melakukan koordinasi pada setiap aktor yang lainnya. Pemkot melakukan rapat bersama dan sosialisasi kegiatan melalui perwakilan-perwakilan setiap organisasi, paguyuban dan swasta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“Selama pelaksanaan MPS2 Pemkot selalu berkoordinasi dan terus menjalin komunikasi dengan aktor yang lainnya karena termasuk peserta dalam program ini. Pada saat rapat disusun acara kegiatan akan terus dijalankan setiap 3 bulan sekali dan dilakukan sosialisasi di Sekda, masyarakat, dan swasta. Semua *stakeholder* terlibat disini dan juga melakukan rapat dengan Bapak Lurah Kebonsari Kulon, Jati dan Tisnonegaran karena acara MPS2 berada di cakupan 3 kelurahan ini”. (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014, pukul 10.15 WIB di Kantor Bappeda)

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak H.M. Buchori, selaku Walikota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“Acara ini tidak hanya diikuti oleh lembaga pendidikan dan BUMN saja namun, perusahaan swasta seperti Eratex dan PT KTI rencananya akan bergabung termasuk pengusaha-pengusaha sukses. Pada MPS2 nanti semua elemen masyarakat, komunitas dan UMKM bisa berpartisipasi dan untuk memaksimalkan *event* tersebut, satuan kerja terkait terus melakukan koordinasi secara internal”. (Sumber: Harian Bangsa, Jum’at 8 Mei 2009).

Setelah dilakukan rapat dihadapan semua *stakeholder* maka diputuskan *launching* MPS2 dilakukan tepat di depan rumah dinas walikota. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009, MPS2 merupakan agenda rutin dan berkelanjutan serta tema kegiatannya pun berbeda tergantung *event* pada bulan yang bersangkutan dan koordinator acara. Selama *launching* acara berjalan dilakukan acara pertunjukkan kesenian khas Kota Probolinggo dan pelaksanaan program MPS2 dilaksanakan hari minggu mulai pukul 05.00-09.00 WIB di sepanjang Jalan Panglima Sudirman mulai depan rumah dinas Walikota Probolinggo sampai dengan pertigaan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Gatot Subroto.

Dalam pelaksanaan MPS2 setiap SKPD juga melakukan pembagian sembako gratis sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Melalui program ini masyarakat yang kurang mampu akan terbantu karena pembagian sembako juga dilakukan melalui sistem kupon. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“Pada saat pelaksanaan MPS2 berlangsung selain SKPD menyuguhkan atraksi kesenian juga mengadakan program pembagian sembako gratis melalui kupon. Kupon ini sudah disebar ke masyarakat kurang mampu 3 hari sebelum pelaksanaan MPS2 berlangsung. Masyarakat yang kurang mampu diperoleh melalui sebuah komunitas karena setiap SKPD pasti memiliki sebuah komunitas, maka masyarakat yang kurang mampu akan didata melalui komunitas tersebut. Seperti BAPPEDA mempunyai komunitas penyandang cacat. Juga bisa diserahkan kepada pegawai yang mungkin di sekitar rumahnya terdapat tetangga yang kurang mampu”.

(Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Pihak swasta juga melakukan bantuan melalui penjualan sembako dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga aslinya. Melalui bantuan ini akan mampu mendatangkan pengunjung yang lebih banyak dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Saya kira selama ini dari program MPS2 perusahaan juga sudah banyak terlibat salah satu contoh Indomaret dan Swalayan Karunia Damai Sejahtera mereka menjual sembako dengan harga murah. Misalnya pada saat di toko harga minyak goreng per liternya Rp. 19.000,00 tetapi di MPS2 mereka menjual dengan harga Rp. 16.500,00 per liternya. Hal ini sudah diantisipasi dan disiapkan seperti itu. Perbankan juga melakukan sosialisasi bagaimana melakukan tabungan di bank dan apa manfaatnya. Jadi bukan hanya barang saja, ilmu juga dibagikan serta mampu membantu masyarakat awam mengenai dunia perbankan. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Untuk peserta atau partisipan di Jalan Panglima Sudirman mulai depan rumah dinas Walikota Probolinggo sampai dengan pertigaan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Gatot Subroto dikavling sesuai jumlah peserta yang berpartisipasi. Setiap kavling diberikan stand dalam bentuk tenda-tenda kecil dan nantinya akan diisi oleh SKPD, UMKM, dan swasta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Kavlingan stand akan melibatkan beberapa unsur yaitu unsur dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Untuk unsur pemerintah dilakukan melalui susunan tim langsung dari instruksi Pak Wali, kalau dari masyarakat melalui UMKM yang tergabung dalam paguyuban UMKM dan PKL. Sedangkan swasta biasanya dari Perbankan, swalayan, pabrik, usaha tempat hiburan, hotel dan sebagainya”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Untuk mendukung semua kegiatan program MPS2 diperlukan dana yang bersumber dari APBD langsung yang sudah dianggarkan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009, pendanaan atau pembiayaan kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman-“*Morning on Panglima Sudirman Street*” bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan atau/atau partisipasi swasta dan/atau masyarakat. Untuk setiap penganggaran sejumlah SKPD menganggarkan maksimal Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dalam satu kali episode jadi selama setahun ada 4 anggaran dan maksimal Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah). Namun, rata-rata dari setiap penganggaran itu SKPD menganggarkan $\pm$ Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per episodenya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Untuk pendanaan masing-masing SKPD tidak boleh melebihi dari Rp. 10.000.000,00, maksimal itu. Jadi maksimal dianggarkan Rp. 40.000.000,00 untuk 4 kali kegiatan selama setahun. Itu semua nantinya digunakan untuk pembagian sembako murah maupun gratis”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Hal itu juga diungkapkan oleh Bapak Sugeng Riyadi, selaku Kepala Bidang Perdagangan, bahwa :

“Setiap SKPD rata-rata mengeluarkan dana Rp. 5.000.000,00 untuk satu kali kegiatan. Dana itu digunakan untuk hiburan, stand, sembako dan lainnya. Namun, untuk pelaku UMKM tidak mengeluarkan dana karena dana yang dianggarkan itu juga digunakan pemerintah untuk memfasilitasi UMKM sehingga UMKM hanya menempati tempat yang sudah disediakan untuk berdagang”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.30 WIB Di Diskoperindag)

Selama kegiatan MPS2 peran pemerintah kota beserta semua SKPD berperan untuk mengkoordinasi dan membina seluruh UMKM se Kota Probolinggo dalam setiap kegiatannya, mulai dari alur pendanaan hingga penyediaan stand bagi UMKM. Namun, dalam mengkoordinasikan UMKM se Kota Probolinggo pemerintah kota dan SKPD dibantu oleh paguyuban UMKM Kota Probolinggo untuk saling mensukseskan program ini termasuk jumlah UMKM yang akan mengisi stand. Program MPS2 dalam penyediaan stand jumlahnya tidak selalu sama, kadang bertambah kadang juga berkurang. Pengisian stand selain diramaikan dan diisi oleh SKPD dan UMKM juga diisi oleh swasta. Setiap kegiatan MPS2 dilakukan secara rutin dan terjadwal, dan koordinator setiap kegiatan sudah ditentukan sebelumnya oleh Walikota Probolinggo. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Dalam pengisian stand kita melibatkan unsur pemerintah, masyarakat melalui UMKM dan swasta. Semuanya sudah dikoordinir

sehingga pengisian stand tidak monoton dan berbeda-beda. Ada jadwal tersendiri bagi UMKM untuk mengisi stand sehingga saling koordinasi dengan paguyuban. Jumlah stand rata-rata mencapai 100 sampai 150". (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Hal itu juga diungkapkan oleh Bapak Sugeng Riyadi, selaku Kepala Bidang Perdagangan, bahwa :

"Untuk pengisian stand pelaku UMKM dilakukan secara bergantian dan umumnya mereka berdagang sayur, buha, kerajinan, aksesoris dan sebagainya jumlah stand berkisar 125 bisa bertambah dan berkurang setiap kegiatannya. Pelaku UMKM yang berdagang tergabung dalam Forum Dagang yang berada di naungan paguyuban UMKM Kota Probolinggo". (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.30 WIB Di Diskoperindag)

Secara umum dalam kegiatan MPS2 peranan birokrasi paling terlihat dominan karena program MPS2 merupakan kebijakan yang berasal dari walikota berserta sejumlah SKPD yang terlibat. Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Kota Probolinggo diwujudkan melalui program MPS2 yang dijalankan secara rutin dan terjadwal setiap 3 bulan sekali. Untuk membantu pengusaha UMKM Pemerintah Kota Probolinggo telah banyak melakukan beberapa program pengembangan UMKM, diantaranya yaitu:

- (a) Memfasilitasi akses pendanaan;
- (b) Memperbaharui kemampuan teknologi;
- (c) Membuka akses pasar;
- (d) Menggalakkan promosi dan produk branding;
- (e) Inovasi produk dan membantu UMKM untuk melengkapi segala macam perijinan.

Hal itu juga diungkapkan oleh Bapak Budhie Nuryoko, selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM, bahwa :

“Dalam mengembangkan UMKM di Kota Probolinggo peranan Pemerintah Kota sangat berpengaruh. Peran pemerintah saat ini terus melakukan inovasi diantaranya dengan diadakannya MPS2 sebagai sentra produksi. Dari kegiatan itu peran pemerintah memberikan bantuan atau memfasilitasi pengusaha UMKM dengan adanya stand dan mereka tidak mengeluarkan dana tinggal menempati saja. Selain itu sesuai dengan Tupoksi dalam menumbuhkembangkan pelaku-pelaku UMKM di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- (a) Perkuatan permodalan melalui program dana bergulir dengan bunga rendah 6% satu tahun;
- (b) Bantuan peralatan sarana penunjang contohnya gerobak dan etalase;
- (c) Sarana pemasaran melalui gelar promosi terhadap produk-produk unggulan;
- (d) Membantu pemasaran melalui pameran-pameran contohnya MPS2 dan Semipro baik tingkat regional maupun nasional;
- (e) Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM yang dilakukan 5 sampai 6 kali dalam satu tahun”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.30 WIB Di Diskoperindag)

Selain dari pemerintah, swasta juga mempunyai peranan contohnya melalui bantuan permodalan bagi pengusaha UMKM dan di acara MPS2 perbankan juga akan berpartisipasi selain mengadakan pembagian kupon, perbankan melakukan sosialisasi mengenai dunia perbankan contohnya simpan pinjam, tabungan dan sebagainya. Perbankan juga memberikan program beasiswa yang berasal dari Bank Jatim dan BRI. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Untuk membantu permodalan UMKM, perbankan melakukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui dana bergulir yang dilakukan

Bank Jatim dan BPR dengan bunga 6% 1 tahun”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Untuk peserta yang ingin berpartisipasi, UMKM dapat mendaftarkan dirinya ke Diskoperindag selain itu peserta lain juga dapat mendaftar ke Pemerintah Kota. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Pengusaha UMKM yang ingin berpartisipasi di acara MPS2 dapat mendaftarkan langsung ke Diskoperindag. Pengusaha UMKM yang ikut akan digilir secara bergantian dan mereka adalah yang tergabung di dalam paguyuban UMKM”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Adapun daftar aktor yang terlibat ataupun peserta yang berpartisipasi dalam program MPS2 dapat dilihat pada **Tabel 2.** berikut ini.

Tabel 2.

Daftar Partisipan MPS2

No	Golongan	Instansi/Perusahaan
1	SKPD Kota Probolinggo	
2	Kelompok UMKM, PKL dan home industry	
3	Perbankan	BPR, Bank Jatim, Bank Mega, BCA, BNI 46, Bank Mandiri, BII, BRI
4	Kalangan Sekolah dan Perguruan Tinggi	UPTD Dinas Pendidikan MKKS SMP, SMU SMKN baik negeri maupun swasta dan Perguruan tinggi di Kota Probolinggo dan sekitar Kota Probolinggo
5	Rumah Makan	RM. Sumber Hidup, KFC, RM. Sari Kuring, RM. Pondok Alami
6	Pabrik/perusahaan	PT. TKI, PT. SKI, PT. PAI, PT. Lingga Mas, PT. Eratex Djaja, PT. Coca Cola, PT. Bromo Tirta Lestari (Alamo), Indopherin, PLN, PT. Grand Prima Perkasa, UD. Akas dan Tito Sumber

		Naga, UD. Merpati Motor, Perusahaan Bordir
7	Perusahaan/pertokoan/su permarket	Alfamart, Indomaret, Sinar Terang, GM. Toserba, Giant Hypermarket, KDS Dept. Store
8	Usaha tempat hiburan	Marknauf, Resto Café, Bee Jay Foods, Reno Cafe, Vegas Café
9	Asosiasi Konstruksi/Konsultan	Gapensi, Graha Royal Residence, Kadin, Aksindo, Gapeksindo, Gapkindo, Gabkaindo, Gapeknas
10	Kalangan Pers	Radar Bromo, Surabaya Pagi
11	Organisasi Pemuda/Politik/Profesi, Sosial/Kemasyarakatan	Produk Daur Ulang Sumbertaman, Penjual Bunga TWSL, Penjual Batik, Musyawarah Antar Gereja, Pramuka, PGRI, NU Cabang Probolinggo, Muhammadiyah, Klenteng Tri Dharma, KNPI Kota Probolinggo, Perwosi, Pawargo, Moto Cross Club CB, Paguyuban Vespa
12	Perhotelan	Bromo View Hotel, Hotel Tampiarto, Hotel Ratna
13	Koperasi	Koperasi Mitra Perkasa, KPRI "Visioner Kris", Koperasi Proma, Kopdit Mandiri, Primkoveri Angga
14	MKKS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	
15	Usaha Medis	Dharma Husada, Amanah Husada
16	Perusahaan Telekomunikasi	PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Telkomsel, XL
17	Toko Buku/perpustakaan	Gramedia, Toga Mas, Perpustakaan Kota Probolinggo
18	Bimbingan Belajar	Primagama, Erlangga
19	Perusahaan Angkutan	AKAS, Prima Wisata

Sumber: Dokumentasi Kegiatan MPS2 Tahun 2009-2013

Demikianlah penjelasan mengenai aktor atau pelaku kebijakan dan komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan Perwali

No. 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman. Aktor-aktor yang terlibat saling memberikan apresiasi dan membantu pengusaha UMKM untuk terus berkembang. Untuk mensukseskan program MPS2 tentunya juga dibutuhkan suatu dukungan dari publik atau masyarakat, namun untuk mengetahui bagaimana dukungan dari publik tersebut akan dibahas dalam uraian selanjutnya.

c. Dukungan dari publik

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan perekonomian di Kota Probolinggo. Salah satunya yaitu acara untuk mengembangkan UMKM di Kota Probolinggo dengan menggelar MPS2. Pada acara ini bukan hanya hiburan dan kesenian yang disajikan, tapi juga beragam makanan dan minuman serta produk unggulan Kota Probolinggo, seperti Batik Manggur, sandal batik, aneka minuman tradisional, jajan pasar, dan lainnya.

Digelarnya MPS2 ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru bagi wirausahawan. Selain itu juga untuk menstimulus pada pengusaha UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk dan pemasarannya. Program MPS2 mendapat dukungan yang besar terutama bagi pengusaha UMKM karena dengan adanya MPS2 produk yang diproduksi oleh pengusaha

UMKM Kota Probolinggo semakin dikenal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H.M. Buchori, selaku Walikota Probolinggo, beliau mengatakan bahwa:

“Digelarnya MPS2 ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru bagi wirausahawan. Para pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sangat antusias dengan agenda kegiatan rutin ini. Mereka bisa mempromosikan produknya pada masyarakat Probolinggo sebelum promosi keluar kota. Promosi ini sangat penting dilakukan demi kemajuan usahanya”. (Sumber: Suara Kota, Edisi 101/14 Januari 2010)

Dukungan dari pemerintah untuk program MPS2 dapat dilihat dari usaha Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas untuk kegiatan MPS2 seperti penyediaan tenda/ stand dan tidak adanya pungutan atau pajak untuk menempati stand tersebut sehingga para pengusaha UMKM hanya tinggal menempati stand yang telah disediakan oleh Pemerintah. Para pengusaha UMKM bisa langsung mendaftarkan diri mereka untuk mengisi stand yang telah disediakan kepada Pemerintah Kota dan pada saat pelaksanaan mereka dapat langsung menjual dan mempromosikan barang dagangan yang mereka bawa.

Wujud dukungan dari Pemerintah Kota juga dapat dilihat dari segi pendanaan, meskipun setiap tahun anggaran yang ditentukan tidak boleh melebihi Rp. 40.000.000,00 tetapi Pemerintah Kota setiap episodenya selalu mengeluarkan biaya tambahan sehingga dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan MPS2 per episodenya mengalami kenaikan. Pemerintah terus mengupayakan perkembangan UMKM di

Kota Probolinggo agar ke depannya usaha yang mereka tekuni dapat berkembang dan dikenal semakin luas tidak hanya pada acara MPS2 saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Dukungan dari Pemerintah Kota itu sendiri yaitu selalu komitmen dalam mengembangkan UMKM melalui acara MPS2 ini. Wujudnya dapat dilihat dari partisipasi semua SKPD se Kota Probolinggo. Semua SKPD berpartisipasi melakukan acara pembagian sembako dan meramaikan acara MPS2 agar pengunjung yang hadir semakin banyak dan otomatis dengan pengunjung yang banyak akan membuat dagangan UMKM laris dan dapat menstimulus agar UMKM mampu mengembangkan relasinya dengan pengunjung yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu juga Pemerintah Kota memberikan kenaikan anggaran untuk pelaksanaan MPS2 agar kegiatan MPS2 lebih mampu mengembangkan kreatifitas para pengusaha UMKM seperti tambahan persediaan stand/tenda dan hiburan kesenian. ”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Pelaksanaan MPS2 memang melibatkan banyak orang terutama berkaitan dengan perkembangan UMKM sehingga perlu ada dukungan dari paguyuban UMKM. Paguyuban UMKM saat ini beralamatkan di Jalan Brigjend. Katamso No. 102 Kecamatan Mayangan dan diketuai oleh Bapak Alif. Bapak Alif selaku Ketua Paguyuban UMKM Kota Probolinggo sangat merasakan suka dan duka para pengusaha UMKM. Dalam mengembangkan produksi UMKM, mereka terkadang kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya. Namun, semenjak Pemerintah Kota membuat kebijakan pelaksanaan program MPS2 para pengusaha UMKM merasa terbantu

dalam memasarkan hasil produksinya meskipun pada awalnya sulit untuk menggerakkan semua UMKM untuk ikut berpartisipasi dan berdagang pada acara MPS2. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Kami sangat mendukung acara MPS2 ini, MPS2 merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh para pengusaha UMKM. Ibarat hari raya, MPS2 merupakan hari raya bagi para UMKM karena dengan adanya MPS2 penghasilan kami dapat meningkat dan merasa terbantu dalam hal pemasaran. Namun, pada mulanya saya sebagai Ketua Paguyuban UMKM sedikit sulit untuk mengajak para pengusaha UMKM untuk berdagang di acara MPS2 karena merupakan acara baru sehingga saya mengerahkan pedagang-pedagang UMKM di kawasan alun-alun Kota Probolinggo, tetapi setelah mempunyai dampak yang begitu positif bagi UMKM meraka sangat mendukung dan antusias agar acara MPS2 sering digelar. Dalam pelaksanaan MPS2 sampai saat ini saya terus dipercaya sebagai koordinator untuk mengatur pengusaha UMKM yang akan berdagang dan berpartisipasi pada MPS2, namun untuk melakukan itu semua saya juga dibantu oleh SKPD seperti Diskoperindag”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM).

Dukungan dari Ketua Paguyuban juga terlihat dari bagaimana Bapak Alif selalu mengkoordinasi setiap pengusaha UMKM untuk terus berkreasi dalam membuat produk serta mengembangkan pemasarannya karena acara MPS2 mampu memberikan keuntungan lebih bagi pengusaha UMKM sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Sebenarnya MPS2 merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh pelaku UMKM karena dengan kegiatan ini masyarakat mampu memperoleh penghasilan dua sampai tiga kali lipat dibanding hari biasa”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Selanjutnya wujud dukungan dalam pelaksanaan kebijakan melalui program MPS2 dapat dilihat dari banyaknya jumlah stand

yang setiap episode bertambah. Berdasarkan data Bappeda setiap episode jumlah stand bisa berkurang maupun bertambah, tetapi selama pelaksanaan lebih cenderung terlihat bertambah. Adapun data jumlah stand MPS2 dari tahun 2009-2014 dapat dilihat pada **Tabel 3.** berikut ini.

Tabel 3.

Data Jumlah Stand MPS2 Tahun 2009-2014

No	Tahun	Episode			
		I	II	III	IV
1	2009	203	151	162	175
2	2010	179	274	200	200
3	2011	293	296	278	272
4	2012	295	304	266	231
5	2013	194	224	212	237
6	2014	217			

Sumber: Data yang diolah dari Laporan Kegiatan MPS2 Tahun 2009-2013

Menurut data yang diperoleh dari Bappeda jumlah stand rata-rata berjumlah di atas 200 unit. hal ini dipengaruhi oleh banyaknya dukungan dari masyarakat agar kegiatan ini terus selalu dijalankan, khususnya bagi pengusaha UMKM. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus, selaku pengusaha UMKM, beliau mengatakan bahwa:

“Dibandingkan dengan acara lain, MPS2 ini sangat efektif untuk sarana promosi dan memasarkan produk. Saya dan teman-teman UMKM lainnya sangat mendukung bila MPS2 sering diadakan oleh pemerintah”. (Sumber: Suara Kota, Edisi 101/14 Januari 2010)

Melihat antusias dari masyarakat sangat tinggi dapat dikatakan bahwa kegiatan atau kebijakan dari pemerintah ini sangat didukung oleh publik. Masyarakat terutama pengusaha UMKM sangat terbantu

dengan adanya kegiatan ini dalam melakukan promosi dagangannya. Selain dari pengusaha UMKM dari kebijakan ini juga dirasakan oleh pemilik usaha stand, *sound system*, maupun pedagang PKL biasa. Mereka juga dapat merasakan keuntungan dari kegiatan ini sehingga secara otomatis perekonomian mereka dapat meningkat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sutiah sebagai salah satu pengusaha UMKM, bahwa:

“Program MPS2 merupakan program yang sangat didukung. Saya dengan teman-teman yang lain sangat antusias terhadap program ini. Selain memberikan keuntungan dalam hal peningkatan pendapatan kami juga memperoleh tambahan pelanggan”. (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2014, pukul 14.00 WIB di kediaman Ibu Sutiah)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Dukungan dari masyarakat saat Bappeda mengadakan kuisioner mereka menginginkan kalau program ini dijalankan setiap bulan agar Kota Probolinggo semakin ramai. Secara kasat mata sebenarnya pemerintah memberi bantuan kepada mereka, seperti orang yang mempunyai usaha penyewaan tenda. Dari tenda yang disewa oleh pemerintah menciptakan lapangan usaha maupun pekerjaan bagi mereka. Mereka ingin kegiatan seperti ini diadakan sesering mungkin agar tenaga kerja yang dipekerjakan juga semakin banyak maka mereka akan mendapatkan hasil lebih dibanding dengan hari-hari biasa”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Melalui kegiatan MPS2 masyarakat juga dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Probolinggo seperti perkembangan pembangunan yang terjadi di kota karena di kegiatan ini terlibat sejumlah *stakeholder* mulai dari SKPD, UMKM, dan

swasta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Kalau masyarakat sendiri mereka menginginkan MPS2 bisa dijalankan setiap bulan agar masyarakat dapat melihat perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Probolinggo, selain itu masyarakat dapat melihat perubahan-perubahan apa yang diarahkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Kota Probolinggo”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Meskipun kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan pengusaha UMKM dalam sektor pemasaran kalau tidak sepenuhnya didukung oleh publik maka kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan yang diacapai tidak akan bisa terwujud. Bentuk dukungan dari pengusaha UMKM dapat diwujudkan melalui partisipasi mereka dalam mengisi stand yang telah disediakan untuk berjualan, kemudian akan diramaikan oleh penonton dan atraksi kesenian yang ditampilkan oleh sejumlah SKPD se Kota Probolinggo. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Meskipun inisiatif kegiatan berasal Pemerintah Kota tetapi dukungan masyarakat sangat berpengaruh juga. Masyarakat disini bukan hanya penonton saja, UMKM juga masyarakat jadi kalau UMKM tidak mau jualan maka program ini tidak akan berjalan. Penonton hanya meramaikan acara dan mengajak teman-temannya untuk hadir sehingga kegiatan ini semakin hidup. Dukungan dari pelaku-pelaku usaha ini yang ikut berpartisipasi dan terlibat di dalamnya minim pelaku usaha satu itu kan dia punya tenaga, tenaga ini yang ikut mendukung kegiatan ini ”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Berdasarkan dukungan masyarakat yang begitu besar mereka menginginkan agar MPS2 terus dijalankan setiap bulan. Namun, karena MPS2 sudah diatur dalam Perwali Nomor 17 Tahun 2009 sesuai dengan anggaran yang tersedia maka MPS2 dijalankan secara rutin setiap tiga bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda setiap episodenya. Selain mendapat dukungan dari pengusaha UMKM, penonton yang hadir serta masyarakat Kota Probolinggo juga mendukung sepenuhnya acara yang digelar setiap tiga bulanan ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Catur, sebagai masyarakat Kota Probolinggo, bahwa:

“MPS2 merupakan program yang bagus untuk kemajuan Kota Probolinggo terutama bagi pengusaha UMKM. Namun, selain bagi UMKM saya sebagai warga Kota Probolinggo mendukung acara ini agar terus digelar karena dapat memicu kreatifitas warganya. Kemudian, Kota Probolinggo juga semakin dikenal, kegiatan seperti ini dapat dijadikan hiburan bagi warga Kota Probolinggo serta berkumpul dengan saudara dan teman-teman untuk hadir bersama-sama”. (Hasil wawancara tanggal 11 Februari 2014, pukul 16.00 WIB di kediaman Bapak Catur)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Eva, sebagai masyarakat Kota Probolinggo, bahwa:

“Ajang MPS2 merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya bukan hanya sebagai ajang promosi dagang saja, tetapi kami sebagai warga Kota Probolinggo mendukung dan meramaikan acara ini dengan hadir setiap episodenya karena pada acara MPS2 banyak sekali partisipan yang terlibat sehingga acaranya sangat menghibur dan mendidik seperti adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang mengenali uang palsu yang dilakukan oleh perbankan serta juga memberikan layanan pertukaran uang.” (Hasil wawancara tanggal 11 Februari 2014, pukul 17.00 di kediaman Ibu Eva)

Suatu kegiatan ataupun kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui program MPS2 merupakan suatu kegiatan yang dinanti oleh masyarakat Kota Probolinggo karena melalui acara ini banyak keuntungan dan manfaat yang diperoleh. Pemerintah Kota Probolinggo terus ingin memacu inovasi dan kreatifitas masyarakatnya. Masyarakat merasa terbantu melalui acara promosi semacam MPS2 sehingga dukungan dari acara ini sangat besar. Masyarakat juga memperoleh pengetahuan yang terjadi mengenai perkembangan Kota Probolinggo.

Demikian penjelasan mengenai dukungan dari publik yang terlibat di dalam kegiatan MPS2. Suatu kebijakan pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari publik sehingga dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan ini yaitu para pelaku UMKM karena kegiatan ini memang diarahkan untuk meningkatkan perkembangan pengusaha-pengusaha UMKM terutama dalam bidang pemasaran. Pemasaran yang dilakukan yaitu melalui promosi. Wujud promosi yang diadakan oleh pemerintah yaitu dengan mengadakan kegiatan sentra produksi melalui MPS2. Untuk mengetahui perkembangan acara MPS2 terhadap perkembangan UMKM akan dibahas dalam uraian selanjutnya.

d. Pelaksanaan pengembangan MPS2

Untuk mengembangkan UMKM yang terdapat di MPSS, Pemerintah Kota Probolinggo membuat atraksi hiburan kepada penonton dengan tujuan agar penonton yang hadir semakin ramai. Semakin ramai penonton yang hadir atau menyaksikan kegiatan MPS2 secara langsung, maka para UMKM yang berjualan dagangannya secara otomatis akan terbeli. Para pengusaha UMKM yang berdagang mayoritas mereka berjualan makanan dan minuman karena jenis dagangan seperti itu yang laris diminati masyarakat. Selanjutnya juga terdapat pengusaha UMKM yang berdagang aksesoris, pakaian dan sebagainya. Jumlah penonton yang meningkat secara otomatis juga akan meningkatkan penghasilan bagi pengusaha UMKM itu sendiri, maka dengan penghasilan yang bertambah para pengusaha UMKM mampu mengembangkan produksinya.

Wujud pemerintah untuk menarik partisipasi penonton dilakukan dengan diadakannya atraksi hiburan dari sejumlah SKPD pada saat acara *ceremonial*. SKPD menampilkan pentas seni misalnya kesenian khas Kota Probolinggo yaitu Tari Jaran Bodag dan Budaya Seni Pendhalungan. Selanjutnya ditampilkan program-program inovasi dari Pemerintah Kota Probolinggo sehingga masyarakat menjadi tahu program baru yang akan dilaksanakan di Kota Probolinggo melalui SKPD terkait. Pada acara MPS2 mulai pukul 05.00-09.00 setiap kendaraan bermotor tidak diperbolehkan melewati

Jalan Panglima Sudirman sehingga dikenal istilah *Car Free Day*. Pada acara MPS2 penonton yang hadir hanya dapat berjalan kaki sambil menikmati atraksi hiburan maupun dagangan para pengusaha UMKM. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Untuk terus meramaikan acara MPS2, Pemerintah Kota dan semua SKPD Kota Probolinggo memberikan acara hiburan berupa kesenian khas daerah maupun pembagian sembako murah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung untuk hadir meskipun warga Probolinggo sudah mendukung acara ini, tetapi apabila acara MPS2 terdapat acara hiburan seperti kesenian khas daerah maka MPS2 akan semakin ramai”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Adanya upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kegiatan MPS2 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan jangkauan pemasaran produk. MPS2 merupakan suatu kegiatan sentra produksi, saat acara ini banyak dari kalangan masyarakat yang hadir baik penonton lokal maupun luar daerah sehingga produk UMKM akan semakin dikenal ke luar daerah. Pemasaran yang luas tentunya juga akan berdampak positif bagi pengusaha UMKM sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Budhie Nuryoko, selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM, bahwa:

“Semenjak adanya MPS2 atau kegiatan promosi-promosi dagang terdapat beberapa pengusaha UMKM yang telah mampu memasarkan produknya keluar daerah seperti ke Pulau Kalimantan. Produksi yang mampu mencapai pasar keluar Pulau Jawa berarti pengusaha UMKM itu telah mampu berusaha untuk mengembangkan relasinya dalam hal pemasaran dan mereka mendapat pelanggan lebih. Pelanggan yang bertambah dan produk yang semakin dikenal otomatis

akan menambah jumlah pendapatan mereka sendiri”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.30 WIB di Kantor Diskoperindag)

Untuk terus mengembangkan pengusaha UMKM melalui acara MPS2 Pemerintah Kota selalu mengadakan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM dan kegiatan ini dapat dilakukan melalui paguyuban UMKM. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan arahan bahwa program MPS2 merupakan acara untuk ajang promosi sehingga pengusaha UMKM didorong untuk lebih kreatif. Kegiatan MPS2 dihadiri oleh ribuan orang sehingga acara ini adalah momen bagus untuk mempromosikan dagangan UMKM dan produk unggulan Kota Probolinggo dapat dikenal lebih luas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Untuk dapat mengembangkan UMKM pada acara MPS2 dilakukan sosialisasi pada saat evaluasi dan menjelang pelaksanaan MPS2 episode berikutnya karena pada rapat dilibatkan banyak unsur terutama untuk paguyuban UMKM. MPS2 dilakukan untuk menstimulus UMKM agar lebih kreatif dalam hal meningkatkan pemasaran jadi semakin luas pemasaran semakin banyak pelanggan yang akan memesan produknya ”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bappeda)

Untuk mewujudkan itu semua perlu mengubah pola pikir atau *mindset* pengusaha UMKM agar mereka jangan memproduksi dagangan sebanyak-banyaknya saja, namun juga perlu mengembangkan relasi atau jaringannya. Relasi dan jaringan ini yang nantinya terus mampu mengembangkan UMKM sendiri secara

berkelanjutan. Jadi pengusaha UMKM tidak hanya memperoleh konsumen pada saat acara MPS2 saja, namun setelah acara MPS2 diharapkan pengusaha UMKM mampu terus berkembang. Relasi atau jaringan yang luas mampu diraih melalui kreatifitas pengusaha UMKM itu sendiri, seperti pada saat MPS2 selain menawarkan dagangannya, mereka juga membuat brosur dan kartu nama UMKM sehingga untuk konsumen yang ingin memesan dapat mengetahui alamat dan *contact person* UMKM.

Selanjutnya perkembangan para pengusaha UMKM melalui kegiatan MPS2 dapat dipahami melalui omzet dan jangkauan pemasarannya, namun untuk mengetahui bagaimana peningkatan omzet UMKM melalui MPS2 akan dibahas dalam uraian selanjutnya.

2. Perkembangan UMKM dengan adanya Morning on Panglima Sudirman Street

MPS2 merupakan acara yang ditujukan untuk memacu kreatifitas para pengusaha UMKM. UMKM dibantu oleh pemerintah dalam hal pemasaran karena sebagian besar permasalahan yang menimpa UMKM yaitu sulitnya memasarkan hasil produksi, meskipun mampu menciptakan produksi yang banyak namun tidak bisa dipasarkan secara berkelanjutan maka juga akan sia-sia. Semenjak adanya program MPS2, UMKM merasa sangat diuntungkan dan memberikan banyak manfaat diantaranya mereka dapat mempromosikan

dagangannya sehingga akan memperoleh pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang didapat maka relasinya juga semakin besar dan itu akan terus berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Untuk mengetahui perkembangan UMKM melalui acara MPS2 pertama-tama dapat diketahui dari jumlah pendapatan UMKM. Lalu semakin berkembang UMKM itu perlu dilihat seberapa banyak tenaga kerja yang dikerahkan dan terakhir jangkauan pemasarannya.

a. Jumlah pendapatan

Sebagaimana yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Kota Probolinggo yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan juga pengurangan angka pengangguran melalui investasi berkelanjutan, merupakan pendorong utama bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan kebijakan Perwali Nomor 17 Tahun 2009 melalui kegiatan MPS2. Melalui acara MPS2 perekonomian kota terus berputar, banyak partisipan yang terlibat sehingga arus keuangan pun berputar cepat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Probolinggo Pemkot selalu memfasilitasi pengusaha UMKM dan sangat kompak. Adanya MPS2 bertujuan agar perekonomian kota berputar khususnya pendapatan bagi pengusaha UMKM meningkat dan selalu membuat rakyatnya untuk terus berusaha. MPS2 mengupayakan agar orang yang tidak mampu atau orang yang perekonomiannya lemah bisa usaha dalam kegiatan pemerintah. Keuntungan yang didapat dalam MPS2 bisa mencapai dua atau tiga kali lipat”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan Bapak Totok Hermiyanto, selaku Pimpinan Bank Indonesia Malang, bahwa :

“Bergeraknya sektor riil pada MPS2, menarik perhatian Bank Indonesia untuk ikut berpartisipasi pada MPS2 episode 1 Tahun 2011. Bank Indonesia menjual produk serta menyediakan fasilitas *money changer*. Pertukaran uangnya cukup besar, yakni sekitar Rp. 400 juta dalam hitungan jam. MPS2 bisa mengentaskan kemiskinan dan sektor riil benar-benar bergerak”. (Sumber: Duta Masyarakat, Senin 7 Februari 2011/Hal. 14)

MPS2 mampu menciptakan pertukaran ekonomi begitu cepat dan besar karena melibatkan banyak kalangan dan dari kegiatan ini masyarakat kecil seperti Pedagang Kaki Lima dan tukang becak secara tidak langsung juga akan merasakan dampak positifnya. Sementara itu, pendapatan pengusaha UMKM juga mengalami kenaikan omzet dan bertambah dari pada hari-hari biasanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Kalau masalah perekonomian itu sangat menguntungkan, masyarakat memang dipupuk dalam kegiatan MPS2 ini. Hasil yang dirasakan oleh pengusaha UMKM pun mengalami kenaikan omzet. Hal ini dikarenakan dagangan yang mereka jual laris dan cepat habis.”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Berdasarkan data Bappeda omzet yang diperoleh pada pelaksanaan MPS2 mengalami kenaikan namun kadangkala juga mengalami penurunan. Adapun data omzet yang diperoleh selama kegiatan MPS2 dapat dilihat pada **Tabel 4.** berikut ini.

Tabel 4.

Data Omzet MPS2 Tahun 2009-2014

No	Tahun	Episode			
		I	II	III	IV
1	2009	162.997.500	292.710.000	254.732.500	112.199.000
2	2010	112.775.200	297.798.000	208.472.650	242.538.000
3	2011	812.061.500	305.036.000	255.312.000	285.024.500
4	2012	338.125.000	349.593.500	310.873.000	339.513.000
5	2013	127.962.000	214.590.000	226.725.000	205.363.000
6	2014	102.426.625			

Sumber: Data yang diolah dari Laporan Kegiatan MPS2 Tahun 2009-2013

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Diskoperindag selama tahun 2009-2013 omzet yang dihasilkan dari UMKM se Kota Probolinggo terus mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir ini. Adapun data jumlah omzet UMKM Kota Probolinggo tahun 2009-2013 dapat dilihat pada **Tabel 5.** berikut ini.

Tabel 5.

Data Omzet UMKM Kota Probolinggo Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Jumlah Omzet
1	2009	1.242.001.114
2	2010	1.495.762.493
3	2011	1.928.229.068
4	2012	2.244.537.265
5	2013	2.512.595.060
	TOTAL	9.423.125.000

Sumber: Data Omzet UMKM Kota Probolinggo dari Diskoperindag

Dilihat dari data omzet yang dihasilkan oleh UMKM pada tahun 2009-2014 kenaikan omzet mencapai dua kali lipat. Hal ini tentu dipengaruhi dari peran pemerintah maupun inovasi dari UMKM itu

sendiri. Semanjak adanya ajang promosi MPS2 omzet yang dihasilkan UMKM terus meningkat. MPS2 mampu meningkatkan penghasilan UMKM lebih meningkat dibanding hari-hari biasanya. Adapun jumlah omzet UMKM dari yang terbesar hingga yang terkecil selama pelaksanaan MPS2 berlangsung dapat dilihat pada **Tabel 6.** berikut ini.

Tabel 6

Data Omzet UMKM Pada Pelaksanaan MPS2

No	Jenis Usaha	Omzet
1	Bantal dan kasur	Rp. 2.000.000,00
2	Batik manggur	Rp. 1.500.000,00
3	Mainan	Rp. 1.250.000,00
4	Kripik ikan	Rp. 1.000.000,00
5	Keramik	Rp. 800.000,00
6	Tas Wanita	Rp. 500.000,00
7	Baju dan kaos	Rp. 400.000,00
8	Aksesoris	Rp. 250.000,00
9	Boneka	Rp. 100.000,00
10	Sosis	Rp. 65.000,00

Sumber: Data yang diolah dari Bappeda Tahun 2013

Berdasarkan **Tabel 6.** di atas, penghasilan atau omzet yang diperoleh selama pelaksanaan MPS2 berkisar antara Rp 2.000.000,00 sampai Rp. 65.000,00 dalam satu hari. Kebanyakan selama MPS2 berlangsung produk yang sering diminati yaitu seperti batik, baju, dan bantal atau kebutuhan sehari-hari. Selain itu, produk dengan jenis tersebut juga tahan lama dibanding dengan olahan kuliner.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Pada saat MPS2 dilaksanakan mayoritas pedagang yang laris atau diburu oleh konsumen yaitu sejenis banyal karena bentuk dan motif bantal yang lucu banyak disukai konsumen. Ada juga produk batik manggur dan aksesoris-aksesoris juga laris dan mampu memperoleh pelanggan baru”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Selama kegiatan MPS2 banyak sekali manfaat dan keuntungan yang diperoleh sehingga pengusaha UMKM pun sangat senang apabila kegiatan MPS2 sering kali digelar. Para pengusaha UMKM merasa terbantu dengan pemasaran produknya dan hal ini berdampak baik pada penghasilan mereka. Demikian penyajian data mengenai jumlah pendapatan UMKM Kota Probolinggo, dimana pelaksanaan MPS2 berpengaruh baik pada pendapatan yang diperoleh oleh UMKM.

b. Jumlah pegawai UMKM

Semakin berkembang usaha UMKM semakin bertambah pula SDM yang dibutuhkan. Namun, tidak semua UMKM menambah jumlah pegawainya karena meskipun UMKM berkembang dengan jumlah pegawai yang sudah ditetapkan sebelumnya akan menghemat biaya operasional. Dalam pelaksanaan MPS2 ini banyak pula perubahan yang terjadi di UMKM. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng Riyadi, selaku Kepala Bidang Perdagangan, bahwa :

“Pelaksanaan MPS2 mampu meningkatkan peminat UMKM sehingga semakin lama jumlah UMKM maupun tenaga kerjanya semakin bertambah. Hal ini sangat bagus untuk mengurangi pengangguran. Rata-rata setiap tahun bertambah jumlahnya 3-5 orang”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.30 WIB Di Diskoperindag)

Berdasarkan data yang diperoleh di Diskoperindag Kota Probolinggo, jumlah karyawan UMKM mulai tahun 2009-2013 mengalami kenaikan bahkan mulai tahun 2009-2013 hampir mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Adapun data jumlah karyawan UMKM se Kota Probolinggo dapat dilihat pada **Tabel 7.** berikut ini.

Tabel 7.

Data Karyawan UMKM se Kota Probolinggo Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Jumlah Karyawan
1	2009	4.793
2	2010	5.772
3	2011	7.441
4	2012	8.662
5	2013	9.697
	TOTAL	36.365

Sumber: Data Jumlah Karyawan UMKM Kota Probolinggo dari Diskoperindag

Bertambahnya jumlah karyawan dikarenakan beberapa dari pengusaha UMKM telah mampu mengembangkan relasinya sehingga jumlah permintaan barang semakin banyak. Untuk mengatasi permintaan yang semakin banyak dan membutuhkan waktu yang cepat maka perlu adanya jumlah tenaga kerja. Dari data yang diperoleh pada Diskoperindag jumlah tenaga kerja atau karyawan pada UMKM

menunjukkan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan UMKM di Kota Probolinggo semakin meningkat. Selain itu juga dapat dilihat jumlah pegawai UMKM pada pelaksanaan MPS2. Adapun jumlah tenaga kerja pada UMKM dapat dilihat pada **Tabel 8.** berikut ini.

Tabel 8.
Jumlah Pegawai UMKM

No	Jenis Usaha	Jumlah Pegawai
1	Batik manggur	20
2	Baju dan kaos	18
3	Bantal dan Kasur	17
4	Tas wanita	15
5	Keramik	12
6	Boneka	10
7	Kripik ikan	8
8	Aksesoris	5
9	Mainan	5
10	Sosis	5

Sumber: Data yang diolah dari Bappeda Tahun 2013

Bentuk usaha di Kota Probolinggo yang terbilang cukup tenaga kerjanya terdapat pada usaha jenis batik, baju dan kaos karena memerlukan jumlah produksi yang banyak selain itu juga operator penggunaan alat-alat border dan pembuatan batik. Demikian penyajian data mengenai jumlah pegawai/karyawan UMKM, semakin bertambah jumlah karyawan maka tenaga kerja makin diserap dan otomatis akan mengurangi beban pemerintah untuk menanggulangi pengangguran.

c. Jangkauan pemasaran produk

Penyajian selanjutnya adalah mengenai jangkauan pemasaran produk. Karena jangkauan pemasaran produk merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pengusaha UMKM sebagaimana yang dikemukakan oleh (Yustika: 2003), yaitu UMKM dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan salah satunya kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas. Melalui ajang promosi MPS2 para pengusaha UMKM akan terbantu dalam memasarkan produknya setidaknya jangkauan produksi tidak hanya mencakup daerah lokal saja, namun juga bisa diarahkan ke luar kota. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ishak, selaku Ketua Forum Dagang UMKM Kota Probolinggo, bahwa :

“Perbedaan jangkauan produksi dan keadaan pemasaran UMKM sebelum adanya MPS2 dan sesudah adanya MPS2 begitu terasa. Dulu sebelum pemerintah membuat kebijakan MPS2 pemasaran para UMKM masih kurang hanya dikenal oleh beberapa orang, namun setelah adanya MPS2 pemasaran semakin berkembang, pengusahanya pun semakin dikenal begitu juga dengan produknya seperti batik manggur khas Kota Probolinggo dan bordir-bordir”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 20.00 WIB Di Sekretariat Forum Dagang UMKM)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Budhie Nuryoko, selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM, bahwa :

“Pemasaran melalui kebijakan MPS2 ini sangat efektif karena mampu mendatangkan penonton dari mana saja, meski penonton dominan dari masyarakat Kota Probolinggo, namun juga tidak sedikit yang berasal dari luar Kota Probolinggo yang kebetulan berlibur di Kota Probolinggo. MPS2 menampung produk unggulan UMKM Probolinggo sehingga dari apa yang saya lihat, pembatik Kota

Probolinggo ada komunikasi atau *link* untuk berkerjasama sehingga produksi mereka sampai ke luar Pulau Jawa. Produksi mereka sampai ke Palangkaraya dan pendapatannya pun banyak bisa mencapai kisaran Rp. 30-50 Juta per minggunya”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.30 WIB Di Diskoperindag)

Pernyataan Ibu Ishak dan Bapak Budhie Nuryoko tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Dengan adanya MPS2 terutama makanan kuliner biasanya itu bisa mewakili Kota Probolinggo apalagi kalau ada *event* penilaian di dalam kegiatan perlombaan kuliner se Jawa Timur, Probolinggo sudah ada makanan khas terutama soto koya. Itu tidak sama sotonya dengan daerah lain sehingga MPS2 mampu mendorong pengusaha UMKM untuk memperluas jaringannya”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa melalui program MPS2 jangkauan produksi UMKM semakin berkembang dan dikenal. Mengingat bahwa acara MPS2 pengunjungnya tidak hanya berasal dari Kota Probolinggo tetapi juga berasal dari kota-kota sekitar Kota Probolinggo seperti Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Pengunjung yang berasal dari luar kota memberi dampak bagi pemasaran produksi UMKM karena produk unggulan UMKM Kota Probolinggo dikenal oleh warga sekitar Kota Probolinggo, namun tidak semua UMKM mampu mengembangkan relasi dan jaringannya. Adapun data tentang jangkauan pemasaran UMKM dapat dilihat pada **Tabel 9.** berikut ini.

Tabel 9.

Jangkauan Pemasaran

No	Jenis Usaha	Jangkauan Pemasaran
1	Batik manggur	luar jawa
2	Baju dan kaos	luar kota
3	Bantal dan Kasur	luar kota
4	Tas wanita	luar kota
5	Keramik	dalam kota
6	Boneka	dalam kota
7	Kripik ikan	dalam kota
8	Aksesoris	dalam kota
9	Mainan	dalam kota
10	Sosis	dalam kota

Sumber: Data yang diolah dari Bappeda Tahun 2013

Jangkauan pemasaran dipengaruhi oleh kreatifitas masing-masing UMKM. Apabila semua pengusaha UMKM mampu mengembangkan relasinya melalui ajang promosi MPS2, maka jangkauan pemasarannya pun semakin luas dan keuntungan yang diperoleh yaitu pengusaha UMKM dapat terus memproduksi dagangannya secara berkelanjutan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa kelebihan pada acara MPS2 dapat menstimulus pengusaha UMKM agar lebih kreatif dan menghasilkan tambahan pelanggan serta pendapatan karena MPS2 merupakan ajang promosi yang melibatkan banyak sektor dan berbagai pengunjung dari dalam maupun luar kota. Kekurangan dari kegiatan MPS2 yaitu tidak semua pengusaha UMKM mampu mengembangkan relasinya masih ada beberapa pengusaha UMKM

yang pola pikirnya beranggapan untuk produksi besar-besaran bukan pemasaran seluas-luasnya karena sebenarnya momen MPS2 digelar untuk promosi produk UMKM Kota Probolinggo sehingga untuk terus menjalin pelanggan di kemudian hari, pengusaha UMKM sebaiknya dapat mengembangkan relasinya contohnya pengusaha UMKM hanya menyediakan contoh dan tidak membawa barang banyak-banyak ke acara MPS2, mereka cukup menawarkan barang dan memberikan kartu nama. Apabila ada pengunjung yang tertarik cukup memesan dan pengusaha UMKM memberikan layanan dengan kirim barang.

3. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menerapkan program *Morning on Panglima Sudirman Street*

Dari hasil observasi dan riset yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung pada implementasi program *Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2) dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses keberlangsungan kegiatan MPS2. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor penghambat

1. Tempat dan waktu yang terbatas

Kegiatan MPS2 merupakan kegiatan yang menggunakan jalan raya sebagai tempat pelaksanaannya. MPS2 dilaksanakan di Jalan Panglima Sudirman mulai depan Rumah Dinas Walikota Probolinggo sampai pertigaan Jalan Gatot Subroto. Seluruh peserta

disediakan stand sepanjang Jalan Panglima Sudirman sampai pertigaan Jalan Gatot Subroto maka dengan lahan yang terbatas pengusaha UMKM kadangkala juga menjualkan produk milik temannya yang sengaja menitipkan dagangannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nurani, selaku pengusaha UMKM yang tergabung dalam Forda UKM bahwa:

“Saya memang sengaja menjajakan dagangan yang bervariasi agar pembeli bisa memilih mana yang dikehendaki. Saya mengkoordinir teman-teman untuk menitipkan dagangannya, ada yang nitip camilan, minuman, kerajinan tangan dan lainnya, jadi sekaligus membantu teman-teman UMKM lainnya, karena tempat yang disediakan terbatas”. (Sumber: Suara Kota, Edisi 101/14 Januari 2010)

Pernyataan Ibu Nurani tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Tempat pelaksanaan MPS2 ini sebenarnya kurang luas. Hal ini juga kadang dipengaruhi oleh pemasangan tenda yang tidak sesuai nomor sehingga terjadi pergeseran tempat. Pergeseran tempat ini yang otomatis akan mengurangi tempat UMKM untuk berjualan, maka sebaiknya perlu dikaji lagi saat evaluasi agar perlu adanya tambahan tempat dan pemasangan tenda yang sesuai.”. (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Akibatnya pelaksanaan MPS2 sedikit terganggu dengan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dan Pemerintah Kota dihadapkan oleh bagaimana solusi nantinya agar ada penambahan tempat bagi para pengusaha UMKM karena antusias dari UMKM semakin lama semakin tinggi dan terus bertambah.

Selain dihadapkan pada permasalahan lahan atau tempat yang kurang luas, waktu pelaksanaan kegiatan MPS2 juga terbilang relatif singkat dan rentangan waktunya cukup lama yaitu tiga bulan sekali. MPS2 berdasarkan Perwali Nomor 17 Tahun 2009 dilaksanakan mulai pukul 05.00-09.00 WIB. Empat jam pelaksanaan MPS2 dirasa kurang lama karena menurut para pengusaha UMKM pada saat jam-jam terakhir pengunjung atau penonton MPS2 masih banyak dan dagangan pengusaha UMKM pun terjual laris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng Riyadi, selaku Kepala Bidang Perdagangan, bahwa :

“Pelaksanaan MPS2 sangat singkat yaitu mulai pukul 05.00-09.00 WIB dan waktu yang terbatas itu kadangkala muncul permintaan dari masyarakat agar MPS2 ini dapat dilaksanakan 1 bulan sekali, namun dengan anggaran yang sudah ditetapkan melalui APBD maka pelaksanaan MPS2 tetap dijalankan tiga bulan sekali dengan durasi waktu kurang lebih empat jam”. (Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2014, pukul 11.30 WIB Di Diskoperindag)

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu oleh Ibu Nurani, selaku pengusaha UMKM yang tergabung dalam Forda UKM bahwa:

“Dalam pelaksanaan MPS2 sebaiknya waktu yang disediakan bisa ditambah, karena masih banyak pembeli yang berkunjung di saat jam berakhir. Setiap acara MPS2 dagangan yang dibawa selalu ludes, padahal sudah membawa stok yang banyak”. (Sumber: Suara Kota, Edisi 101/14 Januari 2010)

Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan ini sebenarnya dipengaruhi oleh tempat acara MPS2 yang menggunakan jalan raya sehingga apabila terlalu lama akan mengakibatkan kemacetan di pusat kota mengingat pada pukul 09.00 ke atas kendaraan yang

keluar rumah juga semakin banyak. Selain itu juga untuk menghormati ruko-ruko yang akan buka pada hari minggu.

2. Penataan tempat parkir kendaraan bermotor.

Tempat parkir yang disediakan memang terbilang sangat dekat dengan lokasi pelaksanaan MPS2. Tempat parkir dilokasikan di jalan seberang jalan atau pertigaan antara Panglima Sudirman dengan jalan-jalan yang lainnya seperti Jalan Suyoso, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Suroyo dan sebagainya. Letak parkir yang dekat kadangkala membuat pejalan kaki yang akan memasuki kawasan Jalan Panglima Sudirman sedikit terganggu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Permasalahan selanjutnya yaitu masalah parkir. Penataan parkir perlu ditata, kadang-kadang sebelum acara selesai banyak penonton yang sudah pulang, karena acara memang diperuntukkan untuk pejalan kaki maka tempat parkir harus diletakkan pada tempat yang tidak dekat dengan lokasi acara. Kadangkala ada anak kecil yang kena knalpot kendaraan bermotor. Ya sebenarnya masalah ini hanya permasalahan kecil namun agar pejalan kaki merasa nyaman sebaiknya letak parkir perlu ditata ulang” (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Hal tersebut kadangkala terjadi kurangnya koordinasi antara tukang parkir dengan Dinas Perhubungan.

3. Pencantuman nomor stand pada kupon sembako gratis.

Penjualan sembako murah dan gratis memang menjadi salah satu daya tarik penonton untuk hadir pada acara MPS2. Pembagian sembako gratis dikhususkan pada orang-orang yang kurang mampu

sehingga mereka terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembagian sembako gratis merupakan bentuk sajian peserta dan biasanya dilakukan oleh sejumlah SKPD Kota Probolinggo, namun juga tidak sedikit dari peserta swasta ikut mengadakan kegiatan serupa.

Permasalahan muncul ketika sejumlah SKPD dan swasta membagikan kupon namun tidak mencantumkan nomor stand sehingga orang yang ingin menukarkan kupon dengan sembako sempat mengalami kebingungan dikarenakan jumlah stand yang ada mencapai 100-150 stand. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“Secara umum implementasi MPS2 sudah berjalan dengan baik mas, tidak ada hambatan berarti. Namun kadang juga ada beberapa kendala kecil yang mungkin dapat menyebabkan sedikit kurang lancar dalam hal pembagian sembako. Setiap SKPD yang membagikan kupon kadang-kadang lupa untuk mencantumkan nomor stand. Jadi dirasa kesulitan untuk orang yang menerima bantuan misalnya Bappeda ada di stand nomor 1 kemudian orang-orang yang sudah dapat kupon malah melewati nomor 1 sehingga kadang orang-orang kembali lagi ke tempat awal.” (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014, pukul 10.15 WIB di Kantor Bappeda)

Keadaan ini terjadi karena menjelang pelaksanaan MPS2, SKPD kurang untuk saling mengingatkan sehingga pada kupon belum tercantum nomor stand pelaksanaan pembagian sembako gratis.

4. Pola pikir pengusaha UMKM yang masih menganggap produksi besar-besaran bukan pemasaran besar-besaran.

Para pelaku UMKM di Kota Probolinggo kebanyakan pada momen MPS2 ini mereka melakukan produksi besar-besaran jadi pola pikir yang diterapkan masih bergantung pada 1 momen itu saja bukan untuk berkelanjutan. Sebenarnya MPS2 merupakan ajang promosi dan Pemerintah Kota memancing para UMKM agar selalu kreatif dan inovasi. Kreatif dan inovasi yang dimaksud yaitu pada kesempatan promosi ini mereka perlu memikirkan perkembangan usahanya untuk berkelanjutan kedepannya, contohnya mereka dapat menggunakan brosur, kartu nama maupun *website* sehingga relasi usahanya terus berkembang dan tidak hanya mengandalkan MPS2 saja untuk kegiatan berdagangnya.

Relasi atau *link* yang banyak dapat diterapkan di MPS2 dengan membagikan brosur atau kartu nama sehingga pada pelaksanaan MPS2 para pengusaha UMKM cukup membawakan sampel produknya dan tidak perlu membawa produk sebanyak-banyaknya. Sampel yang dibawa ditawarkan kepada konsumen agar mereka dapat melihat produksi UMKM misalnya produksi makanan ringan khas Kota Probolinggo yaitu keripik-keripik ikan, pengusaha UMKM cukup membawa beberapa produk setelah konsumen mencicipi dan tertarik konsumen dapat pesan langsung dan untuk memberikan nilai tambah pengusaha UMKM dapat menawarkan jasa *delivery*.

Relasi yang luas dan banyak bagi pengusaha UMKM akan memperoleh konsumen yang terus bertambah sehingga produksinya akan terus berkembang tidak hanya dikonsumsi pada saat MPSS saja. Jaringan atau relasi yang luas sebaiknya perlu diterapkan oleh semua pengusaha UMKM agar produksinya semakin dikenal.

b. Faktor pendukung

1. Komunikasi yang efektif di antara para aktor.

Dengan adanya kepercayaan pada setiap aktor, maka dapat tercipta hubungan yang baik dan saling mendukung satu sama lain. Semua pihak yang memiliki kepentingan diikutsertakan dalam setiap rapat dan hasil pertemuan/rapat segera dipublikasikan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Pada saat menjelang MPS2 selalu diadakan rapat karena setiap pelaksanaan MPS2 tema dan koordinatornya berbeda-beda sehingga perlu dimusyawarakan sesuai dengan petunjuk Walikota dan Walikota yang memimpin langsung rapatnya. Rapat persiapan MPS2 melibatkan seluruh pemangku *stakeholder* mengingat peserta MPS2 melibatkan sejumlah kalangan baik dari SKPD, UMKM melalui perwakilan dan beberapa perusahaan yang nantinya ingin bergabung sebagai partisipan MPS2. Setelah mengadakan rapat segera disusun tim koordinasi.” (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014, pukul 10.15 WIB di Kantor Bappeda)

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Alif, selaku Ketua Paguyuban UMKM dan PKL, bahwa:

“Pada saat sosialisasi menjelang MPS2 Pemkot selalu mengikutsertakan semua kalangan terutama UMKM. UMKM yang diundang disini yaitu melalui perwakilan, perwakilan yang ditunjuk yaitu saya sendiri sebagai ketua paguyuban kemudiann dari hasil rapat yang dibahas saya menyampaikan kembali kepada masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 4 Maret 2014, pukul 18.30 di Sekretariat UMKM)

Di dalam komunikasi ini juga disampaikan berbagai keluhan yang ada sehingga untuk MPS2 selanjutnya masalah yang ada dapat diperbaiki. Koordinasi rutin yang terwujud pada tahap implementasi kebijakan atau program akan berpengaruh kepada keberhasilan program tersebut sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman di antara semua aktor dalam melaksanakan kegiatan MPS2.

2. Sikap masyarakat yang selalu aktif untuk hadir pada acara MPS2.

Masyarakat Kota Probolinggo selalu menanti acara MPS2 yang digelar setiap tiga bulan sekali. Melalui MPS2 masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan pembangunan Kota Probolinggo dan kebijakan apa yang akan dibuat untuk terus memajukan Kota Probolinggo. Sejumlah SKPD yang terlibat membuat hubungan antara Pemerintah Kota dengan masyarakat semakin dekat. Hal ini dipengaruhi karena setiap SKPD menampilkan atraksi/hiburan kesenian khas Kota Probolinggo

sehingga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang budaya asli. Banyak masyarakat Probolinggo sendiri yang kurang mengetahui budaya asli Kota Probolinggo namun dengan acara MPS2 selain mengembangkan pengusaha UMKM, kesenian daerah juga ditampilkan sehingga membuat warga Kota Probolinggo menjadi paham dan tahu tentang budaya kesenian Kota Probolinggo. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa :

“Pada saat MPS2 bukan hanya pembagian sembako gratis saja yang membuat warga aktif untuk hadir, namun pada MPS2 juga menampilkan macam-macam atraksi atau hiburan. Pada acara *ceremonial* masing-masing SKPD menampilkan kreatifitas yang dimiliki oleh masing-masing SKPD, misalnya Dinas Pendidikan menampilkan budaya seni Pendhalungan yang mungkin kebanyakan dari masyarakat Kota Probolinggo sendiri belum banyak yang mengenal budaya seni Pendhalungan. Selain itu, juga menampilkan program-program inovasinya.” Kreatifitas-kreatifitas yang ditampilkan juga menyesuaikan tema yang sedang diangkat (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014, pukul 10.15 WIB di Kantor Bappeda)

Masyarakat aktif hadir dan menonton acara ini karena MPS2 banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, selain memperoleh hiburan gratis masyarakat juga memperoleh banyak ilmu melalui penyampaian program inovasi pemerintah, informasi mengenai perkembangan kota dan sebagainya. Hal inilah yang membuat masyarakat selalu menanti acara MPS2 di episode selanjutnya.

3. UMKM yang selalu berkeasi dan berinovasi.

Adanya MPS2 membuat pengusaha UMKM terus berusaha untuk membuat produknya semakin berkembang. Ajang promosi ini merupakan kesempatan besar bagi pengusaha UMKM untuk mengenalkan produknya ke masyarakat luas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Susilawati, selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat, bahwa:

“Para UMKM sangat mendukung sekali acara ini karena momen ini dianggap momen yang bisa memberikan peluang bisnis mulai dari yang kecil sampai besar. Acara ini seperti ajang promo bagi produksi UMKM Kota Probolinggo sehingga mereka terus berupaya untuk selalu berinovasi pada produknya.” (Hasil wawancara tanggal 27 Januari 2014, pukul 10.15 WIB di Kantor Bappeda)

Hal inilah yang membuat kebijakan MPS2 terus berjalan. Para pengusaha UMKM terus mendukung dan menginginkan agar ajang promosi ini selalu digelar untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha UMKM.

D. Pembahasan

1. Implementasi *Morning on Panglima Sudirman Street* dalam mengembangkan UMKM untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu dipahami terlebih dahulu konsep implementasi kebijakan. Konsep implementasi kebijakan itu berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu

kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap sesuatu seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab, Solichin (2012:135) yang mengutip dalam kamus Webster bahwa konsep implementasi kebijakan yaitu menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Untuk mengetahui dampak/akibat dari suatu kebijakan maka pelaksana kebijakan memerlukan suatu perencanaan yang matang dan mampu memberikan dampak yang baik untuk sasaran kebijakan. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai hal contohnya kebijakan untuk mengembangkan UMKM. Kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan UMKM perlu diperhatikan karena UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu pemerintah daerah yang berusaha mewujudkan implementasi kebijakan di bidang UMKM tersebut adalah Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam upaya mengembangkan UMKM Pemerintah Kota Probolinggo membuat suatu kebijakan dalam hal peningkatan pemasaran yaitu melalui program *Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2). Kebijakan ini muncul akibat permasalahan UMKM di Kota Probolinggo mengenai pemasaran produk. Dalam hal ini, Pemkot Probolinggo sebagai salah satu sumber kebijakan yang paling berperan

memberikan sarana dan sebagai fasilitator untuk pengembangan UMKM Kota Probolinggo.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa kebijakan melalui program MPSS melibatkan sejumlah aktor bukan hanya pemerintah sendiri, namun juga melibatkan sektor swasta serta masyarakat untuk berperan aktif serta mendukung perkembangan UMKM. Wujud dukungan dari sektor lain seperti swasta contohnya melalui perbankan, UMKM juga dibantu oleh perbankan dengan adanya Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah 6% setahun. Hal ini sesuai berdasarkan pendapat Abdul Wahab, Solichin (2012:135) mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn yang merumuskan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari hasil pengamatan dan penyajian data sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah menetapkan kebijakan melalui program MPS2 dilatarbelakangi permasalahan UMKM di Kota Probolinggo dalam bidang pemasaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hafsah, 2004: 41-42) bahwa pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah adalah lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Pemasaran yang terbatas dan kurang dilakukannya promosi mengakibatkan suatu

produk tidak akan berkembang sehingga dibuat ajang promosi yang dikenal dengan MPS2 agar relasi atau jaringan UMKM terus berkembang dan semakin luas. Kebijakan perkembangan UMKM tidak serta merta hanya berupa bantuan materi maupun fasilitas dagang UMKM, namun dibutuhkan kebijakan yang memberikan stimulan kemandirian yang berkelanjutan. Melalui kebijakan MPS2, pengusaha UMKM mampu memperluas jaringan pasarnya melalui inovasi dan kreatifitas mereka sehingga tidak hanya mengandalkan ajang promosi MPS2 saja untuk meningkatkan usahanya.

Untuk mengulas lebih dalam mengenai implementasi kebijakan melalui program MPS2, akan dianalisa mengenai sumber dan tujuan kebijakan, aktor atau pelaku kebijakan serta komunikasi antar organisasi dan dukungan dari publik alam upaya pengembangan UMKM Kota Probolinggo.

a. Sumber dan tujuan kebijakan

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan itu berlangsung dapat dilihat dari berbagai model. Model implementasi kebijakan terbagi menjadi model analisis kegagalan, model rasional (*top down*), model pendekatan *bottom up* dan teori-teori hasil sintesis (Parsons, 2011:465). Model *top down* merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan diarahkan ke masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Hal ini berarti suatu kebijakan bersumber dari atas lalu ke bawah, namun untuk melaksanakan model ini perlu didukung

oleh berbagai pihak agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik. Model *bottom up* memberikan keleluasaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan model *bottom up* ide awal kebijakan dari pemerintah, namun kebijakannya terinspirasi dari tuntutan yang sedang dialami oleh masyarakat sekitar. Untuk model hybrid/pendekatan sintesis merupakan model gabungan antara keduanya. Sintesis ini menggunakan konteks *policy subsystem* sehingga semua aktor yang terlibat saling bekerja sama dengan menciptakan rasa saling percaya untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

Untuk menentukan suatu keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain sumber kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, dukungan publik serta sumber daya yang memadai. Menurut Nugroho (2011:634) yang mengutip pendapat Grindle bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Derajat kebijakan ditentukan oleh kedudukan pembuat kebijakan. Pihak yang akan dianalisis pertama kali adalah Bappeda dan Diskoperindag Kota Probolinggo, sebagai perwakilan Pemkot Probolinggo.

Bappeda Kota Probolinggo sebagai unsur pelaksana awal program bersama Walikota Probolinggo membuat suatu kebijakan

untuk mengembangkan UMKM dalam hal pemasaran melalui suatu ajang promosi yang sering disebut dengan istilah MPS2. Dalam program MPS2 Walikota merupakan *leading sector* yang sangat berperan dan harus mengkoordinasikan beberapa SKPD terkait. Ide awal kebijakan berasal dari Walikota Probolinggo bersama dengan Kepala Bappeda dengan tujuan untuk membuat para pengusaha UMKM lebih kreatif dan inovatif. Ide tersebut kemudian disosialisasikan kepada setiap kepala instansi dan perwakilan paguuban serta pihak-pihak lain seperti swasta untuk ikut mendukung acara MPS2. Kedudukan Walikota sebagai pembuat kebijakan telah melahirkan sebuah Peraturan Walikota. Pelaksanaan MPS2 ini kemudian dikaji dan dijelaskan di dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman “*Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2)*”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Grindle (1980), suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun program individu dan biaya telah disediakan maka implementasi kebijakan dilakukan. Sesuai dengan pendapat di atas, suatu kebijakan akan dilaksanakan dalam suatu program sehingga program merupakan bagian dari suatu kebijakan. Secara teknis kebijakan program MPS2 pada setiap pelaksanaannya Walikota menunjuk salah satu SKPD sebagai koordinator acara. Koordinator acara MPS2 setiap episode memang berbeda-beda karena disesuaikan dengan tema yang akan

diambil dan momen pada bulan pelaksanaan. Pada pelaksanaan MPS2 meskipun koordinator setiap episode berbeda, Bappeda selalu melakukan survey/pendataan rutin (tiga bulanan) yang meliputi pendataan modal usaha, omzet, jumlah maupun jenis UMKM, PKL, swasta dan SKPD yang ikut dalam mengisi stand karena pendataan ini nantinya akan dijadikan sebagai laporan yang diserahkan kepada Walikota berupa sebuah nota dinas MPS2. Pendataan yang dilakukan oleh Bappeda akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan guna pelaksanaan MPS2 berikutnya.

Saat ini, Bappeda memiliki jumlah SDM sebanyak 80 orang, yang terdiri dari 47 orang berjenis kelamin laki-laki dan 33 orang berjenis kelamin perempuan dimana mayoritas merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Berdasarkan SDM yang ada di Bappeda untuk kegiatan MPS2 Bappeda membentuk tim untuk melakukan survey. Survey yang dilakukan oleh Bappeda terdiri dari beberapa tim dan setiap tim terdiri dari 2 orang yang akan mendata 15 stand per tim. Setelah melakukan survey, data akan diolah oleh Bappeda untuk mendata perkembangan UMKM. Selanjutnya, untuk mengarahkan UMKM yang akan mengisi stand Pemerintah Kota menyerahkannya kepada Diskoperindag dan Diskoperindag bekerja sama dengan Paguyuban UMKM.

Berdasarkan analisa di atas dapat dipahami bahwa kebijakan bersumber pada Walikota dan kedudukan pembuat kebijakan sebagai

Walikota, maka Kegiatan MPS2 telah terprogram dan diatur di dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman. Kebijakan yang bersumber pada Walikota berarti lebih bersifat *top down* , namun Walikota tidak menentukan kebijakannya atas kemauan sendiri. Hal ini didasari oleh permasalahan UMKM pada bidang pemasaran sehingga keadaan ini juga bisa dijadikan tuntutan bagi Pemerintah Kota untuk membuat kebijakan yang mengarah pada perkembangan UMKM untuk membuat suatu sentra produksi sebagai ajang promosi dagang.

Permasalahan UMKM yang muncul mendorong Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang akan merubah keadaan UMKM sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan ini muncul adanya komunikasi dua arah yang berasal dari atas ke bawah maupun sebaliknya dan sesuai dengan teori hybrid yang mengkombinasikan model *top down* dan *bottom up*. Kebijakan yang menggunakan model hybrid akan lebih mudah untuk menerima saran maupun kritikan agar tujuan pencapaian dalam mengembangkan UMKM melalui program MPS2 dapat dicapai sesuai tujuan yang dibuat.

Menurut Widodo (2006:14) kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut kebijakan program MPS2 dibuat untuk mengatasi permasalahan UMKM kota Probolinggo dalam hal pemasaran. Dari

penjelasan teori dengan kenyataannya program MPS2 telah sesuai dengan pemahaman kebijakan publik yang menjelaskan suatu kebijakan dibuat untuk memecahkan suatu masalah di lingkungan masyarakat. Selanjutnya menurut Soenarko (2005:186-187) faktor keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas lebih dahulu. Hal ini sesuai Perwali Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman telah disebutkan tujuan kegiatan MPS2 secara jelas diantaranya:

- (a) Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha (UMKM-PKL) untuk meningkatkan pemasaran produknya;
- (b) Mengembangkan kreasi dan inovasi masyarakat Kota Probolinggo.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan melalui program MPS2 adalah untuk mengembangkan usaha UMKM dalam hal pemasaran agar pada acara MPS2, UMKM mampu berinovasi untuk meningkatkan jaringan atau relasinya sehingga mereka dapat memperluas jaringan konsumen.

b. Aktor atau pelaku kebijakan dan komunikasi antar organisasi

Dalam teori hybrid atau model pendekatan sintesis disempurnakan melalui pemakaian konteks *policy subsystem*, yaitu semua aktor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses

politik dan kebijakan. Menurut Islamy (2001) aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi baik organisasi publik maupun privat secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu dan bekerja sama dengan menciptakan rasa saling percaya untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

Sesuai dengan isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980) *program implementator* atau pelaksana program dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan juga berkaitan dengan berapa banyak instansi yang ikut dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MPS2 telah diatur dalam Perwali Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 3, yang berbunyi:

- (a) Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman-“*Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2)” dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, swasta ataupun masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana;
- (b) Peserta Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman-“*Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2)” adalah SKPD Pemerintah Kota Probolinggo, swasta/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau masyarakat.

Dari hasil pengamatan dan penyajian data sebelumnya diketahui bahwa setiap SKPD terlibat dan dikoordinatori oleh beberapa instansi sesuai mandat dari Walikota Probolinggo. Koordinator acara dilakukan bergantian sesuai dengan tema dan hari besar nasional. Namun, pada acara MPS2 tidak hanya diikuti oleh instansi dan BUMN saja. Semua elemen masyarakat, komunitas, dan UMKM dilibatkan karena pelaksanaan MPS2 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi guna mengembangkan UMKM. Semakin banyak kalangan yang terlibat maka semakin banyak pula penonton yang hadir sehingga acara ini dapat dimaksimalkan. Selain itu, partisipasi yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat antusias terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota. Hal ini sesuai dengan kriteria pertama dari isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle yang berarti bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan pihak.

Semakin banyak kepentingan yang terlibat pasti dibutuhkan komunikasi diantara para aktor. Komunikasi setiap aktor terjalin pada setiap rapat sebelum dan sesudah acara MPS2 dilaksanakan, pertemuan ini dilakukan agar diketahui apa permasalahan dan perkembangan yang terjadi sehingga pada pelaksanaan MPS2 selanjutnya dapat diperbaiki. Pada implementasi program MPS2, Pemerintah Kota juga telah melakukan sosialisasi kepada semua aktor seperti Sekretaris Daerah, masyarakat, maupun *stakeholder*.

Sosialisasi dilakukan agar aktor yang terlibat mengetahui apa kegiatan yang akan dilakukan pada acara MPS2. Selain itu, sosialisasi juga digunakan sebagai media pengumuman agar masyarakat tahu kapan pelaksanaan MPS2 selanjutnya. Dalam hal ini diperlukan peran media massa agar informasi yang disampaikan dapat tersebar dengan luas. Sosialisasi juga dilakukan secara tidak langsung seperti menggunakan media radio, internet, spanduk, dan poster. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui apa sebenarnya tujuan dan maksud dari kebijakan MPS2.

Selanjutnya analisis berdasarkan teori Grindle bahwa pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya non manusia juga dapat dicontohkan seperti sumber daya finansial. Dalam implementasi program MPS2 sumber daya finansial sangat berpengaruh dalam pelaksanaan MPS2. Apabila tidak terdapat sumber daya finansial, kemungkinan besar program MPS2 tidak akan berjalan karena tidak memiliki dana dan membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Apabila program MPS2 tidak dapat berjalan dengan baik maka untuk mencapai tujuan kebijakan juga tidak akan tercapai.

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan MPS2 sudah diatur dalam Perwali Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 6, yang berbunyi “Pembiayaan kegiatan pagi di jalan Panglima Sudirman–*Morning on Panglima Sudirman Street* (MPS2)” bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan/atau partisipasi swasta dan/atau masyarakat. Sumber daya finansial sangat diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Kegiatan operasional yang dilakukan pada MPS2 seperti pengadaan penyewaan tenda/stand untuk peserta, pembiayaan sound system dan pembagian sembako gratis. Apabila anggaran terbatas maka pelaksanaan MPS2 tidak dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan.

Pada pelaksanaan MPS2 anggaran sudah ditetapkan melalui APBD Kota Probolinggo sehingga setiap SKPD setiap tahunnya sudah menganggarkan untuk pelaksanaan MPS2 empat kali dalam setahun. Setiap SKPD kota Probolinggo sudah menganggarkan Rp.5.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 per episode. Namun, setiap SKPD tidak boleh menganggarkan melebihi Rp. 10.000.000,00 dalam satu kali episode. Apabila sumber daya non manusia sudah tercukupi peranan sumber daya manusia sangat penting karena mengingat pelaksanaan suatu kebijakan dijalankan oleh orang-orang yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat memiliki peranan masing-masing. Pemerintah Kota Probolinggo memiliki peranan sebagai fasilitator dan juga ikut berpartisipasi dengan melibatkan sejumlah SKPD se Kota Probolinggo. UMKM sebagai sasaran kebijakan mampu menggunakan kesempatan ajang promosi sebagai media pemasaran produknya. Sedangkan dari pihak swasta juga ikut membantu dalam

hal pemberian beasiswa maupun modal melalui sosialisasi di acara MPS2.

Melalui analisis konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle bahwa kekuatan, kekuasaan, kepentingan, serta strategi juga diperlukan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi kebijakan. Kegiatan MPS2 yang kebijakannya bersumber dari Pemerintah Kota, Pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengarahkan sumber daya yang ada guna mewujudkan perkembangan UMKM dan membantu pemasaran produk UMKM. Walikota Probolinggo yang sebelumnya dijabat oleh Bapak H.M. Buchori dan sekarang diambil alih oleh istrinya sendiri yaitu Ibu Hj. Rukmini akan sangat memungkinkan bahwa kebijakan MPS2 akan terus berjalan. Masyarakat juga termasuk pihak yang mempunyai kepentingan karena apabila tidak ada masyarakat yang merespon maka kebijakan ini juga tidak akan berjalan. Pemerintah sudah menyiapkan program namun apabila masyarakat khususnya UMKM tidak ikut berpartisipasi maka tujuan program MPS2 tidak dapat tercapai. Pengusaha atau pihak swasta dapat berkepentingan sebagai peserta seperti perbankan, perbankan dapat membantu masyarakat dalam hal berbagai ilmu sehingga tidak hanya menjualkan produk, ilmu juga dapat disampaikan dalam ajang promosi MPS2. Ilmu yang dimaksud seperti penyampaian secara

langsung dan mendalam tentang pinjaman modal melalui KUR dan bagaimana cara menabung serta juga ada pemberian beasiswa.

Berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi MPS2 menunjukkan bahwa kegiatan MPS2 merupakan kegiatan yang didukung oleh banyak kalangan terutama dari UMKM. Komunikasi dari setiap aktor sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada selama kegiatan berlangsung. Komunikasi yang baik antara aktor menunjukkan bahwa kegiatan MPS2 didukung penuh oleh setiap kalangan. Hal itu sesuai dengan teori Grindle dalam isi kebijakannya bahwa pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

c. Dukungan dari publik

Dukungan akan diperoleh apabila suatu kebijakan memberikan dampak positif bagi sasaran kebijakan. Kebijakan akan didukung oleh berbagai pihak apabila kebijakan tersebut memberikan manfaat. Sesuai dengan teori Grindle mengenai jenis manfaat yang akan dihasilkan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan.

Manfaat yang diperoleh selama penyelenggaraan MPS2 antara lain:

- (a) Meningkatnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi;
- (b) Meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya UMKM-PKL;
- (c) Memacu masyarakat Kota Probolinggo untuk berpikir kreatif dan inovatif;
- (d) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Probolinggo.

Manfaat yang berdampak positif sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM, mereka mampu memanfaatkan *event* ini sebagai ajang promosi dalam memasarkan produknya. Kemampuan promosi dagang pelaku UMKM perlu diasah agar mereka mampu mengembangkan relasi dagangnya. Semakin banyak jaringan atau relasi yang dicapai maka semakin berkembang pula pemasaran UMKM tersebut. Pemasaran yang luas tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Melalui MPS2 UMKM juga mampu berpeluang untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan produknya.

Dukungan juga diperoleh dari masyarakat atau penonton agar MPS2 selalu digelar karena acara MPS2 juga dapat dikatakan sebagai hiburan dikala pengunjung berlibur. Acara MPS2 dilaksanakan pada Minggu pagi sehingga orang-orang yang bekerja dapat berkumpul dan berlibur sambil menikmati hiburan serta produk yang dijual oleh

pelaku UMKM. MPS2 dapat dijadikan acara hiburan karena pada acara *ceremonial* dilakukan atraksi hiburan kesenian daerah maupun kesenian lain yang dilakukan oleh setiap SKPD. Selanjutnya, manfaat yang dapat dirasakan oleh pengunjung yaitu adanya penjualan sembako murah atau gratis sehingga juga dapat dijadikan daya tarik sendiri.

Dukungan yang besar karena dipengaruhi oleh lingkungan yang berdampak positif dan baik bagi setiap kalangan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle bahwa lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

Berdasarkan teori yang ada dan melihat kenyataan pada pelaksanaan program MPS2 dapat dikatakan bahwa MPS2 mempunyai dukungan yang besar karena masyarakat maupun UMKM sangat mendukung agar program MPS2 lebih sering dilakukan. Ajang ini dihadiri oleh ribuan penonton sehingga akan mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan bagi UMKM dalam memasarkan produk maupun dalam mengembangkan relasinya.

d. Pelaksanaan pengembangan MPS2

Untuk terus mengembangkan UMKM perlu adanya upaya pengembangan MPS2 pula, agar penonton yang hadir semakin antusias. Penonton yang banyak akan berpengaruh terhadap UMKM. Produk yang dipromosikan secara otomatis akan dibeli oleh pengunjung tergantung bagaimana para UMKM untuk memikat para pengunjung agar dagangan laris dibeli. Pemerintah membuat sebuah acara hiburan untuk menjadikan MPS2 sebagai tempat berkumpul keluarga di minggu pagi. Hiburan yang disuguhkan berupa pagelaran seni yang ditampilkan oleh setiap SKPD. Acara lain juga adanya *car free day* sehingga untuk minggu pagi penonton yang hadir cukup berjalan kaki dan kendaraan bermotor dilarang melintas di Jalan Panglima Sudirman selama MPS2 berlangsung.

Kegiatan hiburan semacam ini dilakukan untuk meramaikan acara MPS2 karena MPS2 dengan acara hiburan kesenian daerah mampu menarik pengunjung dari luar kota. Setelah menikmati acara hiburan dari SKPD, pengunjung dapat menikmati kuliner dan berbagai macam produk unggulan UMKM di Kota Probolinggo. Pada mulanya MPS2 hanya menyajikan hiburan dengan melibatkan siswa-siswi dari berbagai sekolah karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, namun MPS2 dilaksanakan setiap tiga bulan sekali sehingga jangan hanya melibatkan siswa-siswi saja karena pelaksanaan MPS2 setiap episode berbeda temanya. Berdasarkan hal itu, maka Pemerintah Kota

Probolinggo membuat acara hiburan dengan melibatkan semua SKPD untuk menampilkan acara kesenian dan diadakannya *car free day*. Selanjutnya juga diadakan sosialisasi agar pada ajang promosi MPS2 pengusaha UMKM lebih kreatif dan inovatif karena MPS2 sebenarnya untuk merangsang pengusaha UMKM untuk memperluas jaringan atau relasinya sehingga bukan hanya pada acara MPS2 saja konsumen membeli barang produksinya, namun untuk keberlanjutan.

2. Perkembangan UMKM dengan adanya Program Morning on Panglima Sudirman Street

Dalam pelaksanaan MPS2 banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Permasalahan UMKM yang kesulitan dalam memasarkan produk terbantu dengan ajang promosi seperti MPS2. Melalui MPS2, UMKM mampu mendapatkan keuntungan dua sampai tiga kali lipat dan juga memperoleh tambahan pelanggan karena pengunjung yang hadir bukan hanya dari Kota Probolinggo saja sehingga relasi yang tercipta juga semakin berkembang. Mereka juga bisa melakukan promosi diluar kota karena diajak dengan pelanggannya bahkan sampai ke luar pulau Jawa.

a. Jumlah pendapatan

Berdasarkan isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas akan perubahan. Perubahan dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat

dari jumlah omzet atau pendapatannya. Semakin meningkat jumlah omzet yang didapat dari sebelumnya mengindikasikan bahwa program MPS2 telah mampu melakukan perubahan pada derajat UMKM.

Menurut data yang diperoleh dari lapangan dan penyajian data sebelumnya bahwa selama tahun 2009 sampai tahun 2013 kenaikan omzet UMKM naik menjadi dua kali lipat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Diskoperindag pada tahun 2009 jumlah omzet yang diperoleh oleh UMKM Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.242.001.114,00 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 2.512.595.060,00. Hal ini menunjukkan bahwa program MPS2 mampu mendongkrak UMKM Kota Probolinggo dari segi pendapatan atau omzet yang diperoleh. Sementara itu, untuk pendapatan UMKM sendiri pada saat MPS 2 mampu mencapai Rp.2.00.000.00 dan yang paling sering diminati jenis barang seperti batik manggur, kerajinan tangan, aksesoris, dan kaos-kaos.

Melalui acara MPS2 perekonomian kota terus berputar, banyak partisipan yang terlibat sehingga arus keuangan pun berputar cepat. MPS2 dirasa sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM karena pada saat acara MPS2 digelar, keuntungan yang mereka peroleh bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat dibanding hari biasa. Hal ini terjadi karena konsumen dan pengunjung yang hadir pada hari itu mencapai ribuan maka otomatis omzet yang diperoleh UMKM juga meningkat. Omzet yang meningkat akan dapat mengembangkan usahanya karena

uang yang dikelola dapat digunakan keperluan lain misalnya pembelian bahan baku yang bertambah dari pada sebelumnya. Omzet yang bertambah juga dapat meningkatkan produksinya sehingga pemasarannya pun juga dapat berkembang.

b. Jumlah pegawai UMKM

Kegiatan MPS2 selain berdampak terhadap peningkatan omzet yang diperoleh UMKM juga berdampak terhadap jumlah pegawai UMKM. Pegawai yang bertambah membuktikan bahwa UMKM semakin berkembang dan membantu tugas pemerintah untuk mengentas pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Diskoperindag mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 jumlah pegawai UMKM telah meningkat sebanyak 4.904 orang. Pada tahun 2009 jumlah UMKM mencapai 4.793 orang sedangkan pada tahun 2013 telah mencapai 9.697 orang. Pertambahan jumlah pegawai UMKM dipengaruhi oleh UMKM yang semakin berkembang. UMKM dapat berkembang karena produksi mereka bertambah dan pemasarannya semakin luas sehingga membutuhkan SDM yang cukup. Sumber daya manusia yang dipekerjakan bisa mencapai 25 orang dan jenis UMKM yang terdapat banyak tenaga kerja ada di usaha batik karena usaha batik juga memerlukan berbagai macam tahapan untuk memperoleh batik yang bagus.

MPS2 telah mampu meningkatkan peminat UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga semakin lama jumlah tenaga yang diperlukan akan bertambah. Sesuai dengan isi teori Grindle melalui jenis manfaat yang dihasilkan dan derajat perubahan yang diinginkan bahwa pelaksanaan MPS2 memberikan manfaat dan dampak positif terhadap perkembangan UMKM. Pengusaha UMKM mampu melakukan perubahan yang sebelumnya kemampuan produksi dan SDM nya terbatas, saat ini dapat meningkatkan jumlah produksi dan menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

c. Jangkauan pemasaran produk

UMKM merupakan pihak yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah melalui program MPS2. Dampak yang dirasakan oleh UMKM sebagai sasaran kebijakan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Dampak positif yang dirasakan oleh UMKM salah satunya yaitu jangkauan pemasaran produk. Permasalahan yang kerap melanda pengusaha UMKM yaitu masalah pemasaran. UMKM seringkali gagal berkembang karena tidak mampu dalam melakukan pemasaran meskipun mereka mampu melakukan produksi. Produksi banyak, namun apabila tidak bisa dipasarkan akan percuma sehingga pemasaran yang luas akan mampu mendorong perkembangan UMKM.

Sesuai dengan teori Grindle (1980) bahwa keluaran yang diperoleh dari implementasi kebijakan yaitu tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran. Perubahan yang terjadi dapat dilihat pada kondisi sebelum adanya MPS2 dan sesudah adanya MPS2. Sebelum program MPS2 diimplementasikan, pemasaran produksi UMKM sangat terbatas dan kurang dikenal. Pemasaran produksi mereka hanya dikenal di kawasan lokal saja. Setelah program MPS2 dijalankan sejak tahun 2009, perlahan-lahan UMKM mampu mengembangkan usahanya. Produksi yang dikembangkan oleh UMKM lebih dikenal dan pemasarannya dapat keluar kota. Pengusaha UMKM dalam bidang tekstil dan bordir contohnya, mereka mampu menggunakan acara ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan promosi usahanya. Produksi tekstil dan bordir Kota Probolinggo telah mampu dipasarkan sampai Palangkaraya dan omzet yang diperoleh juga berkisar puluhan juta per pekan.

Dari keadaan UMKM di lapangan saat ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak positif terhadap perkembangan usaha UMKM. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jim Ife yang dikutip oleh Suhendra (2006:88) bahwa salah satu prinsip perkembangan masyarakat menjadikan masyarakat semakin percaya diri dan mampu meminimalkan bantuan dana dari pemerintah. MPS2 mampu menciptakan kepercayaan diri kepada pengusaha UMKM, hal ini dapat dilihat bagaimana cara

UMKM mampu mengembangkan jangkauan pemasarannya. Jangkauan pemasaran yang luas akan berpengaruh kepada omzet yang diterima. Semakin banyak omzet yang diperoleh, maka mereka menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan dana pemerintah.

3. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menerapkan program *Morning on Panglima Sudirman Street*

Dari hasil penyajian data telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung pada implementasi program MPS2 dalam mengembangkan UMKM, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses keberlangsungan kegiatan MPS2. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor penghambat

1. Tempat dan waktu yang terbatas

Kegiatan MPS2 merupakan kegiatan yang menggunakan jalan raya sebagai tempat pelaksanaannya. MPS2 dilaksanakan di Jalan Panglima Sudirman mulai depan Rumah Dinas Walikota Probolinggo sampai pertigaan Jalan Gatot Subroto. Jalan raya Panglima Sudirman dipilih sebagai lokasi implementasi MPS2 karena tempatnya yang strategis untuk dikunjungi dan dilewati berbagai macam transportasi umum dari segala jurusan. Selain itu permasalahan yang muncul yaitu waktu pelaksanaan MPS2 setiap

episodenya relatif singkat yaitu mulai pukul 05.00-09.00 WIB. Waktu yang relatif singkat dikarenakan tempatnya yang berada pada jalan raya sehingga apabila sudah terlalu siang akan menyebabkan kemacetan karena sudah banyak kendaraan bermotor yang beroperasi.

Menurut Soenarko (2005:185) salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan yaitu dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah teknis. Tempat yang dipilih kurang luas berpengaruh pada durasi waktu implementasi MPS2. Tempat dan waktu yang terbatas merupakan salah satu permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan. Permasalahan teknis kadangkala memang sering muncul, namun pada pelaksanaan MPS2 permasalahan-permasalahan teknis didiskusikan lebih lanjut solusinya pada evaluasi kegiatan dan rapat menjelang episode berikutnya.

2. Penataan tempat parkir kendaraan bermotor

Tempat parkir yang disediakan terbelah dekat dengan lokasi kegiatan MPS2 sehingga menyebabkan pengunjung yang baru datang dengan pengunjung yang akan keluar terlihat kurang nyaman. Permasalahan yang sering muncul dalam implementasi MPS2 adalah permasalahan teknis sehingga menyebabkan implementasi sedikit terhambat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soenarko (2005:185) salah satu faktor

penghambat implementasi kebijakan yaitu dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah teknis.

3. Pencantuman nomor stand pada kupon sembako gratis

Penjualan sembako murah dan gratis memang menjadi salah satu daya tarik penonton untuk hadir pada acara MPS2. Pembagian sembako gratis dikhususkan pada orang-orang yang kurang mampu sehingga mereka terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang muncul sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soernarko (2005) yaitu kurang memperhatikan masalah teknis. Ketika sejumlah SKPD dan swasta membagikan kupon, mereka lupa tidak mencantumkan nomor stand sehingga orang mengalami kebingungan pada saat akan menukarkan kupon.

4. Pola pikir pengusaha UMKM yang masih menganggap produksi besar-besaran bukan pemasaran besar-besaran

Para pelaku UMKM di Kota Probolinggo kebanyakan pada acara MPS2 *mindset* mereka masih berpikir bahwa MPS2 adalah kesempatan produksi besar-besaran bukan pemasaran besar-besaran. Sebenarnya MPS2 merupakan ajang promosi, Pemerintah Kota Probolinggo membuat suatu kebijakan dalam hal pemasaran guna mengembangkan UMKM agar mampu memperluas jaringan atau relasinya. Semakin berkembang relasi yang diperoleh maka semakin besar pula konsumen yang diperoleh. Relasi akan terus berkembang sehingga produksi UMKM akan terus berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan MPS2 beberapa UMKM saja yang mampu melakukan hal itu seperti usaha kuliner, border, dan batik manggur. Sesuai apa yang dikemukakan oleh Hafsah (2004:41-42) bahwa permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil pada umumnya merupakan unit usaha yang mempunyai jaringan terbatas oleh karena itu produk yang dihasilkan jumlahnya juga terbatas.

b. Faktor pendukung

1. Komunikasi yang efektif di antara para aktor

Kepercayaan pada setiap *stakeholder* tercipta hubungan yang baik dan saling mendukung satu sama lain. Sesuai dengan teori dan pendapat dari Soenarko (2005:186-187) bahwa salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan adanya persetujuan, dukungan, dan kepercayaan dari rakyat. Melalui persetujuan, dukungan, dan kepercayaan maka tidak ada pesan yang menimbulkan kesalahpahaman dalam tataran dan pemahaman akan suatu informasi. Semua pihak yang memiliki kepentingan diikutsertakan dalam rapat melalui salah satu perwakilan.

Koordinasi rutin terus dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan selama kegiatan program MPS2, koordinasi dipimpin langsung oleh Walikota dan dihadiri oleh sejumlah kalangan baik dari instansi, paguyuban UMKM, maupun dari pihak swasta.

Koordinasi dan komunikasi yang baik akan berpengaruh kepada keberhasilan program tersebut.

2. Sikap masyarakat yang selalu aktif untuk hadir pada acara MPS2

Dukungan dari masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari program MPS2. Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan MPS2 dapat dilihat dari antusias mereka dalam menghadiri acara MPS2. Sarana yang diberikan Pemerintah Kota tidak akan berguna apabila tidak ada dukungan dan partisipasi masyarakat. Melalui acara MPS2 masyarakat akan memperoleh berbagai macam manfaat seperti dapat mengetahui perkembangan dan pembangunan Kota Probolinggo. Selain itu juga akan membuat hubungan masyarakat dengan Pemerintah Kota semakin dekat. Adanya atraksi hiburan kesenian dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan budaya daerah. Masyarakat juga akan membantu perkembangan UMKM dengan cara mengenalkan dan membeli produk UMKM. Produk UMKM yang semakin dikenal akan mendapat konsumen dari luar kota karena acara MPS2 tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Kota Probolinggo saja. Sikap masyarakat yang aktif juga merupakan dukungan positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh respon serta *feedback* positif dari masyarakat.

3. UMKM yang selalu berkreasi dan berinovasi

Ajang promosi dagang MPS2 sebagai sentra produksi membuat para pengusaha UMKM terus melakukan inovasi dan kreasi. Inovasi dan kreasi mereka ditunjukkan bukan hanya melalui beragamnya produk yang mereka buat tetapi juga bagaimana cara mereka untuk menarik dan mengembangkan jaringan. Cara yang dilakukan untuk mengembangkan dan menarik konsumen dapat dilakukan seperti melakukan layanan jasa pengiriman barang. Hal ini telah menunjukkan nilai lebih bahwa *service* yang baik akan membuat pelanggan puas dan senang. Kreatifitas dan inovatif yang dilakukan oleh pengusaha UMKM merupakan wujud UMKM benar-benar memanfaatkan acara MPS2 sebagai promosi dagang. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung implementasi MPS2 karena apabila Pemerintah Kota membuat kebijakan untuk mengembangkan UMKM melalui sarana sentra produksi namun apabila UMKM nya tidak mendukung kebijakan ini tidak akan berjalan.

Selanjutnya dari beberapa faktor penghambat dan pendukung di atas dapat dianalisa berdasarkan model *Force Field Analysis* bahwa suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila kekuatan-kekuatan yang menolak atau sebagai penghambat terus ditekan oleh kekuatan-kekuatan yang mendukung. Menurut data yang diperoleh di lapangan kebijakan MPS2 mengalami kendala pada hal teknis saja, namun

kendala teknis dapat diatasi dengan adanya komunikasi yang baik pada setiap aktor melalui rapat yang dipimpin oleh walikota.

Pada analisa model *Force Field Analysis* terdapat tiga tahapan, yaitu:

1. *Unfreezing*, keadaan organisasi sekarang (saat organisasi akan mulai melakukan perubahan). Pada tahap ini yang melakukan perubahan untuk perkembangan UMKM yaitu Pemerintah Kota Probolinggo dengan SKPD penggagas yaitu Bappeda. Kekuatan yang menjadi penggerak untuk melakukan perubahan yaitu kondisi UMKM yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produk karena kurangnya jaringan sehingga Pemerintah Kota membuat kebijakan dengan mengadakan program MPS2 untuk menstimulus para pengusaha UMKM agar lebih kreatif dan mampu memperoleh jaringan yang luas agar kedepannya mereka dapat lebih mudah memasarkan hasil produksi karena sudah mempunyai pelanggan.
2. *Moving*, keadaan mulai melakukan pergerakan kepada keadaan baru yang diinginkan melalui partisipasi dan keterlibatan secara aktif. Sesuai dengan tahapan pada analisa model *Force Field Analysis* keadaan baru mulai diterapkan dan banyak kalangan yang berpartisipasi dimulai seluruh jajaran SKPD se Kota Probolinggo hingga swasta dan tentu

pengusaha UMKM karena mereka sebagai sasaran kebijakan dan acara MPS2 dapat dijadikan sebagai ajang promosi untung mengembangkan usaha dan relasinya. Keterlibatan secara aktif dilakukan oleh semua aktor dan setiap aktor berpartisipasi dengan menyuguhkan acara sesuai dengan arahan Pemerintah Kota, seperti setiap SKPD terlibat pada acara MPS2 dengan melakukan acara pertunjukkan kesenian dan pembagian sembako gratis. Tujuan setiap SKPD dilibatkan karena MPS2 merupakan agenda rutin yang terus dilakukan untuk meramaikan acara MPS2 sektor swasta seperti perbankan melakukan sosialisasi tentang ciri-ciri uang palsu dan memberikan layanan pertukaran uang. Pengusaha UMKM sebagai sasaran kebijakan terus melakukan promosi unggulan mereka dengan menempati stand secara gratis yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota. Apabila acara sudah berlangsung namun tidak ada dukungan dari pengunjung tentu akan percuma, namun pada hal ini masyarakat Kota Probolinggo partisipasinya tinggi dan antusias untuk menghadiri acara MPS2 bahkan pengunjung yang hadir juga ada dari luar kota, maka hasil produksi UMKM Kota Probolinggo mampu mencapai pemasaran luar kota.

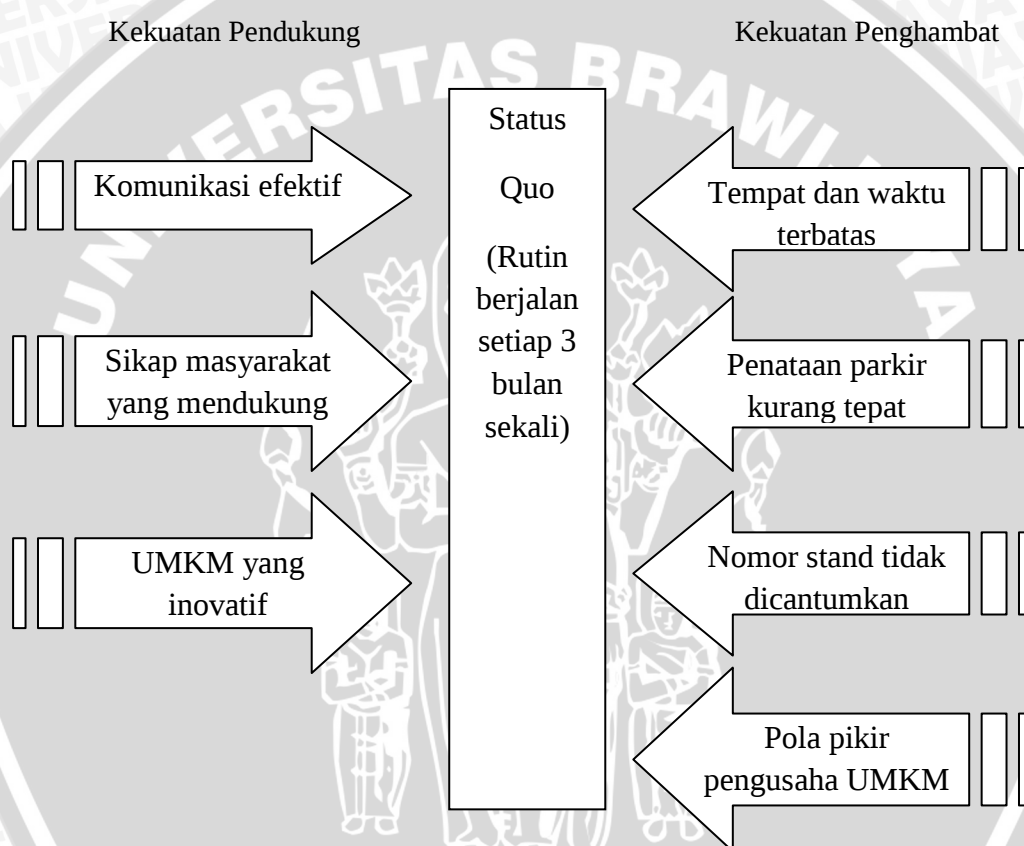
3. *Refreezing* merupakan keadaan fokus kepada membekukan atau menetapkan dan menstabilkan kondisi yang baru melalui

pengaturan kebijakan. Pada tahap terakhir dilakukan *refreezing* karena kebijakan ini sudah mulai stabil. Penstabilan kebijakan telah dilakukan aturan bahwa acara MPS2 akan terus dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan koordinator yang berbeda-beda dari setiap instansi. Keadaan itu sudah diatur pada Perwali Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman bahwa kegiatan MPS2 dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali dengan tema yang berbeda per episodenya dan koordinator yang berbeda pula. Koordinator pada kegiatan MPS2 ditunjuk langsung oleh Walikota Probolinggo. koordinator ditunjuk berdasarkan tema yang akan diusung.

Setelah tahapan-tahapan model *Force Field Analysis* dijelaskan, maka identifikasi selanjutnya yaitu tentang yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung kegiatan MPS2. Pada keadaan ini terdapat dua kekuatan yaitu yang mendukung perubahan dan yang menolak perubahan. Pada saat perubahan terjadi, kekuatan-kekuatan tersebut saling menekan dan pada akhirnya kekuatan yang mendukung semakin banyak dan kekuatan yang menolak semakin sedikit sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor penghambat yang terjadi pada pelaksanaan MPS2 sebagian besar merupakan kendala yang bersifat teknis karena pelaksanaan MPS2 mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya pengusaha

UMKM dan kegiatan ini merupakan kegiatan bantuan Pemerintah Kota untuk membantu pengusaha UMKM agar dapat lebih mudah untuk memasarkan produksinya.

Selanjutnya analisa faktor penghambat dan faktor pendukung dapat dilihat pada **Gambar 6.** berikut ini.



Gambar 6. Analisa Model *Force Field Analysis* pada MPS2

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Kekuatan penghambat yang terdapat di lapangan pada saat pelaksanaan MPS2 merupakan faktor penghambat berupa permasalahan teknis seperti tempat dan waktu yang terbatas, penataan parkir, dan lupa mencantumkan nomor stand pada kupon sembako gratis. Permasalahan yang ada bukan permasalahan serius dan untuk

mengantisipasi keadaan seperti itu menjelang MPS2 episode selanjut dibahas melalui rapat seluruh aktor, namun untuk waktu dan tempat memang sudah diatur dalam Perwali sehingga pelaksanaan dan tempatnya tidak berubah. Untuk mengubah pola pikir pengusaha UMKM agar lebih memperhatikan relasi atau jaringan diadakan sosialisasi maksud dan tujuan MPS2 lebih mendalam terhadap para UMKM.

Kekuatan pendukung sendiri berasal dari sejumlah aktor karena kegiatan MPS2 selain untuk mengembangkan pengusaha UMKM juga dapat dijadikan sarana rekreasi bagi pengunjung pada hari minggu. Keratifitas dan inovasi pengusaha UMKM juga merupakan dukungan dari UMKM bahwa mereka benar-benar memanfaatkan momen ini untuk ajang promosi. Setelah mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat sesuai dengan penjelasan di atas, maka keadaan sekarang MPS2 rutin berjalan setiap tiga bulan sekali dengan dikoordinatori SKPD yang berbeda-beda setiap episodenya lalu dana berasal dari APBD dan setiap SKPD sudah menganggarkan setiap tahunnya.